

NO.1026/KOM-D/SD-S1/2010

**KINERJA HUMAS PEMERINTAH KABUPATEN PELALAWAN
DALAM MENYUKSESKAN PROGRAM PEMERINTAH**

SKRIPSI

Diajukan Untuk Melengkapi Tugas-Tugas dan Memenuhi
Syarat-Syarat Guna Memperoleh Gelar Sarjana Sosial
Pada Fakultas Dakwah dan Ilmu Komunikasi



OLEH:

SEPTI TRIANA
NIM. 10643004117

**PROGRAM S.1
JURUSAN ILMU KOMUNIKASI**

**FAKULTAS DAKWAH DAN ILMU KOMUNIKASI
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
SULTAN SYARIF KASIM RIAU
2010**

ABSTRAK
KINERJA HUMAS PEMERINTAH KABUPATEN PELALAWAN DALAM
MENYUKSESKAN PROGRAM PEMERINTAH

Belum meratanya pembangunan di daerah kabupaten Pelalawan, terbukti dengan masih adanya desa miskin dan tertinggal yang menunggu giliran dibangun melalui program pemerintah kabupaten. Hal ini merupakan persoalan yang harus diselesaikan oleh pemerintah kabupaten Pelalawan. Kinerja Humas sangat dibutuhkan dalam langkah-langkah yang lebih jelas agar pemerataan pembangunan bisa tercapai. Pentingnya kinerja humas secara maksimal dan terprogram akan dapat memberikan keuntungan bagi instansi tersebut.

Penelitian ini dilakukan di humas pemerintah kabupaten Pelalawan dengan tujuan untuk mengetahui kinerja humas dalam menyukseskan program Pemerintah, serta faktor penghambat dan pendukung keberhasilan humas dalam menyukseskan program Pemerintah kabupaten Pelalawan.

Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah deskriptif kualitatif. Teknik pengumpulan data melalui wawancara, observasi, dan dokumentasi. Subjek dalam penelitian ini adalah pegawai humas pemerintah kabupaten Pelalawan sedangkan objeknya adalah kinerja humas pemerintah kabupaten Pelalawan dalam menyukseskan program pemerintah. Populasi dalam penelitian ini adalah seluruh staf humas yang berjumlah 10 orang. Teknik yang digunakan *total sampling* karena dari 10 orang tersebut mempunyai sifat yang sama, maka penelitian ini memilih 3 orang pegawai humas yakni kabag humas, kasubag berita dan dokumentasi, dan kasubag Pengumpulan Data Pengelolaan Publikasi.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa kinerja humas pemerintah kabupaten Pelalawan sudah berjalan dengan baik dengan cara memberikan informasi Program pemerintah yakni program peningkatan akses informasi, program peningkatan jangkauan penyebarluasan informasi publik dan program peningkatan sumberdaya aparatur. Program disosialisasikan melalui media massa, melalui media luar ruang seperti membuat spanduk, slogan dan brosur, membuka website, serta meningkatnya media publikasi yang digunakan humas. Media yang digunakan adalah media cetak dan media elektronik. Faktor pendukung kinerja humas adalah adanya kerjasama yang baik dengan media baik media cetak maupun elektronik, adanya fasilitas sarana dan prasarana. Faktor penghambat kinerja humas antara lain Sumber Daya Manusia karena masih sedikitnya pegawai humas yang memiliki *skil* di bidang kehumasan, kurangnya jumlah personil humas dan kurangnya dana untuk kegiatan humas merupakan faktor penghambat dalam melaksanakan kinerja Humas.

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR	i
DAFTAR ISI.....	ii
ABSTRAKSI	iii
DAFTAR GAMBAR.....	iv
BAB I : PENDAHULUAN	
A. Latar belakang.....	1
B. Alasan pemilihan judul.....	6
C. Penegasan istilah	6
D. Permasalahan	7
E. Tujuan dan kegunaan penelitian	7
F. Kerangka teoritis dan konsep operasional	9
G. Metodologi penelitian	25
H. Sistematika Penulisan	27
BAB II : GAMBARAN UMUM LOKASI PENELITIAN	
A. Sejarah Kabupaten Pelalawan.....	41
B. Visi Dan Misi	45
C. Tugas Humas Pemerintah Kabupaten Pelalawan.....	38
G. Struktur Organisasi	52
BAB III : PENYAJIAN DATA	
A. Kinerja Humas Pemerintah Kabupaten Pelalawan	42

B. Faktor Pendukung dan Penghambat Kinerja Humas Pemerintah Kabupaten Pelalawan.....	63
BAB IV : ANALISIS DATA	
A. Kinerja Humas Pemerintah Kabupaten Pelalawan	67
B. Faktor Pendukung dan Penghambat Kinerja HUmAs.....	82
BAB V : PENUTUP	
A. Kesimpulan	87
B. Saran.....	88
DAFTAR KEPUSTAKAAN	
LAMPIRAN – LAMPIRAN	

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Perkembangan humas saat ini maju dengan pesatnya. Setiap instansi dipastikan membutuhkan praktisi humas. Keberadaannya sangat dibutuhkan karena humas mempunyai peran yang sangat penting dalam suatu instansi. Kemajuan dan kemunduran instansi tergantung pada kinerja humas itu sendiri. Humas merupakan profesi yang menjadi mediator antara lembaga yang diwakilinya dengan publik baik eksternal maupun internal. Humas harus bisa membangun hubungan baik dengan mereka karena hal ini nantinya bisa memberikan keuntungan bagi kedua belah pihak

Kabupaten Pelalawan dibentuk berdasarkan UU No. 53 tahun 1999 tanggal 12 Oktober 1999, yang merupakan pemekaran dari kabupaten Kampar. Saat ini kabupaten Pelalawan dibagi dalam 12 kecamatan yang terdiri dari 93 Desa dan 12 Kelurahan. Dengan segala potensi dan prospek perkembangan ekonomi yang dimiliki, akhir-akhir ini kabupaten Pelalawan menjadi salah satu tujuan pencari kerja mengadu peruntungan. Oleh karenanya jumlah penduduk kabupaten Pelalawan terus meningkat, selain disebabkan oleh kelahiran, terutama oleh meningkatnya jumlah pendatang yang menetap di kabupaten Pelalawan.

Adapun visi dan misi kabupaten Pelalawan yaitu terwujudnya kabupaten Pelalawan maju dan sejahtera, melalui pemberdayaan ekonomi kerakyatan yang didukung oleh pertanian yang unggul dan industri yang tangguh dalam masyarakat yang beradat, beriman, bertakwa dan berbudaya Melayu tahun 2030.

Sejak diberlakukan undang-undang otonomi daerah mulai tanggal 1 Januari 2001, setiap daerah harus berusaha sekuat kemampuannya untuk meningkatkan PAD (Pendapatan Asli Daerah). Dalam mencapai target PAD tersebut banyak usaha yang dilakukan oleh masing-masing pemerintah daerah, diantaranya memaksimalkan potensi sumber daya yang ada. Oleh sebab itu, setiap daerah harus jeli dalam mencari potensi-potensi baru yang ada di wilayahnya termasuk kabupaten Pelalawan.

Guna percepatan pelaksanaan pembangunan, maka pemerintah daerah kabupaten Pelalawan mempertajam dan memprioritaskan pembangunan pada lima arah kebijakan pembangunan, yaitu :

1. Kebijakan Pengembangan Ekonomi Rakyat
2. Kebijakan peningkatan Pendidikan
3. Kebijakan Peningkatan Kesehatan
4. Kebijakan Peningkatan Perhubungan
5. Kebijakan Peningkatan Aparatur

Demikian komplitnya program pemerintah yang dicanangkan tentunya merupakan suatu terobosan baru untuk menyongsong kabupaten yang lebih maju dan bersaing dengan kabupaten lain yang ada di provinsi Riau. Dan juga dalam

setiap pelaksanaan visi dan misinya diperlukan kinerja humas serta pengertian dan partisipasi masyarakat demi terlaksananya suatu pembangunan.

Peningkatan perekonomian masyarakat merupakan isu utama yang harus dilakukan, karena harus diakui bahwa kebijakan pemanfaatan sumberdaya ekonomi yang ada selama ini belum memihak kepada masyarakat banyak. Oleh sebab itu, maka perlu dibuka peluang yang sebesar-besarnya dan dalam mekanisme yang terkendali bagi masyarakat untuk mengelola dan memanfaatkan sumberdaya ekonomi tersebut. Kebijakan pemberdayaan ekonomi rakyat ini dilakukan dengan mendorong perkembangan usaha ekonomi menengah dan usaha ekonomi besar menjadi lokomotif yang akan menarik dan memacu peningkatan ekonomi rakyat. Oleh sebab itu, pola kemitraan usaha menjadi tumpuan dan pijakan bagi pengembangan usaha ekonomi di Kabupaten Pelalawan, baik di sektor pertanian, perikanan, peternakan, perkebunan, kehutanan, industri, serta bidang jasa lainnya.

Humas merupakan suatu alat atau saluran untuk memperlancar jalannya interaksi dan penyebaran informasi, mengenai publikasi pembangunan nasional melalui kerjasama dengan pihak pers, media elektronik ataupun menggunakan media tradisional lainnya. Keberadaan unit kehumasan (hubungan masyarakat) disebuah instansi milik pemerintah merupakan keharusan secara fungsional dan operasional, dalam upaya menyebarluaskan informasi atau mempublikasikan kegiatan dan aktivitas instansi kepada masyarakat (Widjaja: 1993:3).

Humas memegang peranan penting dalam organisasi. Adapun peranan humas dapat dibagi menjadi empat kategori diantaranya :

1. Sebagai penasehat ahli (*expert prescriber*)
2. Fasilitator komunikasi (*communication fasilitator*)
3. Fasilitator proses pemecahan masalah (*problem solving process fasilitator*)
4. Teknisi komunikasi (*communication technician*) (Rosady: 2008:20).

Peranan diatas bisa dijadikan sebagai bahan pedoman untuk menyukseskan program-program yang sedang dilakukan serta sebagai bekal untuk meningkatkan kinerja humas. Tidak hanya instansi berskala kecil, lembaga besar juga sangat membutuhkan akan jasa humas, karena disuatu lembaga itu bisa dipastikan memiliki banyak kepentingan dan tanggung jawab sosial, setiap publik pasti memiliki keinginan, kebutuhan yang berbeda-beda antara satu dengan yang lainnya. Bahkan dari keinginan itu bisa menjadi konflik bagi instansi itu sendiri yang dikhawatirkan bisa mengganggu kestabilan instansi tersebut apabila tidak dicari pemecahannya secara cepat dan akurat. Kerenanya humas dituntut untuk menciptakan kerjasama dengan dasar hubungan baik dengan publiknya.

Pentingnya kinerja humas secara maksimal dan terprogram akan dapat memberikan keuntungan bagi instansi tersebut. Hal ini diperkuat dengan catatan sejarah yang ditorehkann oleh pemerintah pusat, maupun pemerintah daerah. Banyak prestasi yang sudah dicapai oleh pemerintah secara umum, akan tetapi

kurang dikomunikasikan maka keberhasilan tersebut jadi tertutupi oleh kelemahan yang banyak terekspos oleh media massa.

Selama ini pembangunan di daerah kabupaten Pelalawan masih belum mensejahterakan semua masyarakat. Masih ada desa miskin dan tertinggal yang menunggu giliran dibangun melalui program pemerintah kabupaten, terbukti saat ini persoalan-persoalan yang mendera kawasan dan yang membuat desa-desa tertinggal, belum bergeser dibandingkan tiga tahun yang lalu, yakni sejak program penanggulangan desa tertinggal dilancarkan pemerintah daerah. Oleh karena itulah kinerja Humas sangat dibutuhkan dalam langkah-langkah yang lebih jelas agar pemerataan pembangunan bisa tercapai.

Berdasarkan fenomena yang dikemukakan, maka penulis tertarik untuk mengadakan penelitian pada Humas pemerintah kabupaten Pelalawan. Dari penjelasan di atas, kinerja humas sangat penting dalam pemerintahan termasuk dalam menyukseskan program pemerintah, karena berhasil atau tidaknya sebuah lembaga atau instansi sangat tergantung pada kinerja kehumasannya, untuk itu penulis mengadakan penelitian dengan judul **“Kinerja Humas Pemerintah Kabupaten Pelalawan dalam Menyukseskan Program Pemerintah”**.

A. Alasan Pemilihan Judul

1. Judul ini menarik untuk diteliti, karena mengingat pentingnya kinerja humas di sebuah instansi pemerintahan.
2. Penulis ingin mengetahui sejauh mana kinerja humas pemerintah kabupaten Pelalawan dalam menyukseskan program pemerintah.
3. Judul ini diteliti karena berkaitan dengan konsentrasi kehumasan yang sedang penulis geluti.

B. Penegasan Istilah

1. Kinerja humas adalah hasil kerja secara kualitas dan kuantitas yang dicapai oleh seorang humas, instansi, dalam melaksanakan tugasnya sesuai dengan tanggung jawab yang diberikan kepadanya (Anwar Prabu Mangku Negara, 2000: 27).
2. Pemerintah kabupaten Pelalawan adalah penyelenggara pemerintah daerah otonom oleh pemerintah daerah dan DPRD menurut asas desentralisasi (UU Otonomi Daerah, 1999: Pasal 1).
3. Program pemerintah adalah kumpulan kegiatan yang sistematis dan terpadu untuk mendapatkan hasil yang dilaksanakan oleh satu atau beberapa instansi pemerintah dalam rangka kerjasama dengan masyarakat, guna mencapai sasaran tertentu.

4. Menyukkseskan dapat diartikan suatu pekerjaan yang dilakukan untuk memperoleh keberhasilan atau keberuntungan (Departemen Pendidikan Nasional, 2005: 131)

C. Permasalahan

1. Batasan Masalah

Untuk memudahkan penelitian ini peneliti membuat rumusan masalah sehingga masalah dalam penelitian ini terarah. Adapun batasan masalah yang akan diteliti adalah kinerja humas pemerintah kabupaten Pelalawan dalam menyukkseskan program pemerintah tahun 2010.

3. Rumusan Masalah

- a. Untuk Bagaimana kinerja humas pemerintah kabupaten Pelalawan dalam menyukkseskan program pemerintah?
- b. Apa saja faktor yang menghambat dan mendukung kinerja humas pemerintah kabupaten Pelalawan dalam menyukkseskan program pemerintah?

D. Tujuan Dan Kegunaan Penelitian

1. Tujuan penelitian

Sesuai dengan rumusan masalah, maka tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui:

- a. Untuk mengetahui kinerja humas pemerintah kabupaten Pelalawan dalam melaksanakan program Pemerintah.
- b. Untuk mengetahui faktor penghambat dan pendukung kinerja Humas Pemerintah Kabupaten Pelalawan dalam melaksanakan program Pemerintah.

2. Kegunaan penelitian

Adapun kegunaan penelitian ini adalah :

- a. Kegunaan Akademis
 - 1) Memberikan gambaran dan informasi kepada pihak-pihak terkait khususnya civitas akademik komunikasi mengenai realitas tugas humas dalam melaksanakan program pemerintah.
 - 2) Sebagai tambahan pengetahuan dan pengalaman peneliti guna memperdalam ilmu di bidang kehumasan.
- b. Kegunaan Praktis
 - 1) Untuk memperluas wawasan serta cakrawala berfikir dalam kajian ilmiah.
 - 2) Sebagai sumbangsih pemikiran kepada humas pemerintah kabupaten Pelalawan dalam melaksanakan program pemerintah.

E. Kerangka Teoritis dan Konsep Operasional

1. Kerangka Teoritis

a. Kinerja Humas

Kinerja adalah hasil kerja secara kualitas dan kuantitas yang dicapai oleh seorang pegawai, instansi, dalam melaksanakan tugasnya sesuai dengan tanggung jawab yang diberikan kepadanya (Mangkunegara, 2006: 27).

Sedangkan menurut Amstrong dan Baron (dalam Wibowo, 2007: 2) menyatakan bahwa kinerja merupakan hasil pekerjaan yang mempunyai makna lebih luas, bukan hanya menyatakan sebagai hasil kerja, tetapi juga bagaimana proses kerja berlangsung. Kinerja adalah tentang melakukan pekerjaan dan hasil yang dicapai melalui pekerjaan tersebut. Kinerja adalah tentang apa yang dikerjakan dan bagaimana cara mengerjakannya.

Dari pengertian diatas kita dapat menyimpulkan bahwa kinerja adalah serangkaian proses kerja sampai pada hasil kerja. Sebagai sebuah hasil kerja maka kinerja pun dapat diukur, ukuran kinerja merupakan alat ukur yang bersifat objektif sehingga diperlukan adanya kriteria yang sama. Dengan kriteria yang diharapkann memberikan hasil yang dapat diperbandingkan secara objektif dan adil. Kriteria suatu ukuran kinerja menurut Amstrong dan Baron (dalam Wibowo, 2007: 319) seharusnya adalah:

- a. Dikaitkan dengan tujuan strategis dan mengukur apa yang secara organisasional penting dan mendorong kinerja

- b. Relevan dengan sasaran dan akuntabilitas tim dan individu yang berkepentingan
- c. Memfokuskan pada output yang terukur dan penyelesaian tugas dan bagaimana orang bertindak dan bagaimana tingkah laku mereka
- d. Mengindikasikan data yang akan tersedia sebagai dasar pengukuran
- e. Menjadi setepat mungkin dalam hubungan dengan maksud pengukuran dan ketersediaan data
- f. Mengusahakan dasar untuk umpan balik dan tindakan

Menurut J. Fred Westin (dalam Prawirosentono, 1999: 2), menjelaskan bahwa kinerja dalam suatu organisasi terbagi atas tiga kategori, yaitu :

1. Kinerja Strategik

Kinerja ini dilihat dari ketetapan organisasi dalam memilih lingkungannya untuk beradaptasi (penyesuaian) suatu organisasi/instansi dalam lingkungan dimana tempat organisasi/instansi tersebut beroperasi. Kinerja strategik ini dipegang oleh *top-management* (managemen tingkat tinggi) atau pemimpin.

2. Kinerja Administrasi

Kinerja ini berkaitan dengan kinerja administrasi organisasi, termasuk di dalamnya tentang struktur administrasi yang mengatur hubungan otoritas (wewenang) dan tanggungjawab dari orang yang menduduki

jabatan atau bekerja pada unit-unit kerja yang terdapat dalam organisasi.

3. Kinerja Operasional

Kinerja ini berkaitan dengan efektifitas penggunaan sumberdaya yang digunakan oleh instansi. Berdasarkan beberapa pendapat diatas dapat disimpulkan bahwa kinerja merupakan prestasi kerja atau kemampuan kerja dari dari suatu tim/individu dari suatu bagian bagi pencapaian tujuan organisasi. Sedangkan penilaian kinerja dimaksudkan untuk menilai prestasi kerja tersebut, apakah sesuai dengan perencanaan yang telah ditetapkan.

Mangkunegara (2006: 67) menyatakan bahwa faktor yang mempengaruhi kinerja antara lain :

- a. Faktor kemampuan. Secara psikologis kemampuan (*ability*) pegawai terdiri dari kemampuan potensi (*IQ*) dan kemampuan realita (pendidikan). Oleh karena itu, pegawai perlu ditempatkan pada pekerjaan yang sesuai dengan keahliannya.
- b. Faktor motivasi. Motivasi terbentuk dari sikap (*attitude*) seorang pegawai dalam menghadapi situasi (*situation*) kerja. Motivasi merupakan kondisi yang menggerakkan diri pegawai terarah untuk mencapai tujuan kerja. Sikap mental merupakan kondisi mental yang mendorong seseorang untuk berusaha mencapai potensi kerja secara maksimal.

Sedangkan menurut Ruki (2004: 8) faktor-faktor yang mempengaruhi kinerja pegawai antara lain :

1. Kesetiaan yaitu tekad dan kesanggupan mentaati, melaksanakan dan mengamalkan sesuatu yang ditaati dengan penuh kesadaran dan tanggungjawab.
2. Prestasi kerja yang dimaksud adalah kinerja yang dicapai pegawai dalam melaksanakan tugas yang diberikan kepadanya.
3. Tanggungjawab yaitu kesanggupan seorang pegawai dalam melaksanakan tugas yang diberikan dengan sebaik-baiknya, tepat waktu dan bersedia menanggung resiko terhadap tugas tersebut.
4. Ketaatan artinya kesanggupan pegawai dalam mematuhi setiap peraturan dan norma baik yang tertulis maupun yang tidak tertulis.
5. Kerjasama artinya kemampuan pegawai untuk berada dalam *tim work* sehingga mencapai daya guna dan hasil guna yang sebesar-besarnya.
6. Prakarsa yaitu kemampuan pegawai untuk mengambil inisiatif sendiri tanpa menunggu perintah kedinasan dengan pertimbangan terlebih dahulu.
7. Kepemimpinan artinya kemampuan pegawai untuk mengarahkan pegawai lainnya dalam menyelesaikan tugas pokok.

Menurut Mahmudi (2005: 21) kinerja merupakan suatu konstruk multimedimensional yang mencakup banyak faktor yang mempengaruhinya. Faktor-faktor yang mempengaruhi kinerja adalah:

1. Faktor personal/individual meliputi pendidikan, pengetahuan, ketrampilan (*skil*), kemampuan, kepercayaan diri, motivasi dan komitmen yang dimiliki oleh individu.
2. Faktor kepemimpinan, meliputi kualitas dalam memberikan dorongan, semangat, arahan dan dukungan yang yang diberikan pemimpin/*team leader*.
3. Faktor tim, meliputi kualitas dukungan dan semangat yang diberikan oleh rekan dalam satu tim,kepercayaan terhadap sesama anggota tim, kekompakan dan keeratan anggota tim.
4. Faktor sistem, meliputi sistem kerja fasilitas kerja, infrastruktur yang diberikan organisasi .
5. Faktor kontekstual, meliputi tekanan dan perubahan lingkungan eksternal dan internal.

b. Humas

Humas adalah hubungan yang terbuka dengan masyarakat. Humas memasyarakatkan kebijaksanaan untuk mempengaruhi pendapat masyarakat, atau suatu penyebaran pengaruh secara sadar dan terencana (Onong, 2006: 20).

Menurut professor Edward.I. Bernays (dalam Bonar, 1993: 11-12) mengatakan bahwa hubungan masyarakat mempunyai tiga pengertian yaitu:

1. Memberikan penerangan kepada masyarakat
2. Membujukkan langsung terhadap masyarakat guna mengubah sikap dan tindakan
3. Usaha-usaha pengintegrasian sikap dan tindakan dari instansi pemerintah dengan masyarakat dengan lembaga pemerintah.

Dari definisi diatas maka dapat disimpulkan humas merupakan seseorang ditugaskan untuk memberikan penjelasan baik secara intern dan ekstern dan mampu untuk menganalisa, menasehati, dan mempunyai wawasan yang luas untuk meningkatkan suatu lembaga kepada masyarakat umum, adapun ciri-ciri humas itu sendiri adalah:

1. Komunikasi yang dilancarkan berlangsung dua arah secara timbal balik.
2. Kegiatan yang dilakukan terdiri atas penyebaran informasi, penggiatan persuasi dan pengkajian pendapat umum.
3. Tujuan yang hendak dicapai adalah tujuan organisasi tempat humas menginduk.
4. Sasaran yang dituju adalah khalayak dalam organisasi dan khalayak diluar organisasi.
5. Efek yang diharapkan adalah terbinanya hubungan yang harmonis antara organisasi dan khalayak (Effendy, 2004:132)

Faktor yang cukup penting berhasil atau tidaknya pelaksanaan program acara atau aktivitas kerja humas yang telah disusun adalah sebagai berikut:

- 1 Bagaimana perencanaan kerja dan komunikasi dari humas untuk mencapai tujuan utama.
- 2 Bagaimana peranan pelaksanaannya, dan menilai program kerja humas
- 3 Bagaimana menyelenggarakan komunikasi dua arah timbal balik dalam yaitu sebagai berikut:
 - a. Penyampaian pesan (*message*)
 - b. Mengolah dan menyalurkan arus informasi (*communication chanel*) kepada publiknya (komunikan) dengan tujuan untuk mencapai citra positif (*effect*) bagi organisasi yang diwakilinya itu (Ruslan, 2008: 29)

Salah satu tugas dan fungsi humas adalah manajemen komunikasi antara instansi dan publiknya yang dituangkan dalam aktivitas humas. Lebih lanjut dalam Widjaja (1993: 57) merinci aktivitas humas sebagai berikut:

1. Pengumpulan dan pengolahan data
 - a. Mengumpulkan data untuk keperluan informasi
 - b. Mengolah data
 - c. Menyajikan data hingga siap digunakan
 - d. Mengarsipkan data sehingga sewaktu-waktu dapat digunakan kembali
 - e. Melayani kebutuhan data bagi yang memerlukan
 - f. Membuat klipping dari seluruh media massa.

2. Penerangan

- a. Menyebarkan informasi dengan jelas
- b. Mengadakan hubungan dengan media massa
- c. Mengadakan pemberian kehumasan
- d. Membuat dokumentasi kegiatan lembaga
- e. Menyelenggarakan pameran
- f. Memberikan pelayanan informasi dengan menyajikan berita dan keliping
- g. Mengalbumkan foto-foto kegiatan
- h. Mengikuti kunjungan kerja pejabat/pimpinan

3. Publikasi

- a. Menerbitkan warta harian, mingguan, majalah bulanan, dan folder
- b. Menerbitkan buku kerja
- c. Ikut serta menyelenggarakan publikasi antara lain pameran pembangunan

c. Humas Pemerintah

Bagian humas pada pemerintahan dibentuk untuk mempublikasikan atau mempromosikan kebijakan-kebijakan. Berfungsi untuk memeberikan informasi tentang kebijakan, rencana dan hasil kerja institusi bersangkutan serta memberikan pengertian kepada publik tentang peraturan atau perundang-undangan dan segala sesuatu yang berpengaruh terhadap kehidupan masyarakat.

Humas pemerintah berbeda dengan Humas non pemerintah, pada humas pemerintah tidak mempunyai sesuatu yang diperjual belikan. Kendati demikian Humas pemerintah juga senantiasa menggunakan teknik publisitas yang dilakukan untuk menyadarkan masyarakat akan hal-hal yang berhubungan dengan kegiatan pemerintah.

Dasar pemikiran humas dalam lembaga pemerintah berdasarkan pada dua hal pokok *pertama*, masyarakat punya hak untuk mengetahui karena itu pemerintah mempunyai tanggungjawab guna memberi penjelasan kepada masyarakat. *Kedua*, ada kebutuhan bagi pemerintah untuk menerima masukan dari masyarakat tentang persoalan baru dan tekanan sosial guna memperoleh partisipasi dan dukungan masyarakat (Moore, 2002:131)

a. Tugas dan Kewajiban Humas Pemerintah

Menurut Jhon D. Millet (dalam Ruslan, 1999: 94-96) *Manajemen in public services the quest for effective performance*, yang artinya peranan humas di instansi atau lembaga pemerintahan terdapat beberapa hal dalam melaksanakan tugas atau kewajiban utamanya, yaitu sebagai berikut:

1. Mengamati dan mempelajari tentang hasrat, keinginan-keinginan dan aspirasi yang terdapat dalam masyarakat.
2. Kegiatan untuk memberikan nasehat atau sumbang saran dalam menanggapi untuk apa sebaiknya dapat dilakukan instansi atau lembaga pemerintah seperti yang dikehendaki oleh pihak publiknya.

3. Kemampuan untuk mengusahakan terciptanya hubungan memuaskan yang diperoleh dari antara hubungan publik dengan para pejabat pemerintah.
4. Memberikan penerangan dan informasi tentang apa yang telah diupayakan oleh suatu lembaga atau instansi pemerintah yang bersangkutan.

b. Fungsi Humas Pemerintah

1. Mengamankan kebijaksanaan dan program kerja pemerintah yang diwakilinya.
2. Memberikan pelayanan, menyebarluaskan pesan-pesan dan informasi mengenai kebijaksanaan, hingga mampu mensosialisasikan program-program pembangunan baik secara nasional maupun daerah kepada masyarakat.
3. Menjadi komunikator dan sekaligus mediator yang promotif dalam upaya menjembatani kepentingan instansi pemerintah disuatu pihak, dan menampung aspirasi atau opini publik (masyarakat), serta memperhatikan keinginan-keinginan masyarakat lain.
4. Berperan serta secara aktif dalam menciptakan iklim yang kondusif dan dinamis, demi mengamankan stabilitas dan program pembangunan baik dalam jangka pendek maupun jangka panjang.

c. Fungsi Pokok Humas

1. Mengamankan kebijaksanaan pemerintah
2. Memberikan pelayanan/menyebarkan informasi dalam rangka meyakinkan masyarakat

3. Menerima/menampung informasi dari masyarakat
4. Menjadi komunikator aktif dalam rangka komunikasi dua arah (Widjaja, 1993:127)

d. Peran Taktis dan Strategi Humas Pemerintah

1. Secara taktis dalam jangka pendek, humas instansi pemerintah berupaya memberikan pesan-pesan atau informasi yang efektif kepada masyarakat sebagai khalayak sasarannya. Kemampuan untuk melaksanakan komunikasi yang efektif, memotivasi dan memiliki pengaruh terhadap opini publik sebagai upaya “menyamakan persepsi” dengan tujuan dan maksud dari instansi pemerintah.
2. Secara strategis (jangka panjang) humas instansi pemerintah berperan secara aktif dalam proses pengambil keputusan, dalam memberikan sumbang saran, gagasan dan ide yang kreatif serta cemerlang untuk mensukseskan program kerja lembaga bersangkutan (Ruslan, 2002 : 94).

d. Progam Pemerintah

Program pemerintah adalah kumpulan kegiatan yang sistematis dan terpadu untuk mendapatkan hasil yang dilaksanakan oleh satu atau beberapa instansi pemerintah dalam rangka kerjasama dengan masyarakat, guna mencapai sasaran tertentu.

Program dilakuan setiap tahun dalam kurun waktu 5 (lima) tahun dan direncanakan pelaksanaan dan pembiayaannya baik melalui APBN/APBD

maupun dalam rangka kerjasama dengan masyarakat. Sejauh mungkin diidentifikasi pula berbagai program ataupun kegiatan yang merupakan peran serta aktif masyarakat sebagai tanggapan atas kebijakan atau pun program pemerintah, serta kinerjanya.

Keberhasilan program yang dilakukan sangat erat kaitannya dengan kebijakan instansi. Dalam rangka itu perlu diidentifikasi pula keterkaitan antara kebijakan yang tetap ditetapkan dengan program dan kegiatan sebelum di implementasikan. Kebijakan tersebut perlu dikaji terlebih dahulu untuk meyakinkan apakah kebijakan yang telah ditetapkan benar-benar dapat dilaksanakan. Sasaran dan program yang telah ditetapkan dalam rencana strategik kemudian dijabarkan lebih lanjut ke dalam suatu rencana kinerja tahunan

Lima arah kebijakan pembangunan kabupaten Pelalawan yaitu:

1 Kebijakan Pengembangan Ekonomi Rakyat

Program kerja yang dibiayai APBD kabupaten meliputi:

- 1) Pendampingan/pembinaan usaha
- 2) Penguatan modal
- 3) Pengadaan sarana dan prasarana pengembangan usaha,
- 4) Pengendalian dan pengaturan perizinan.

2 Kebijakan peningkatan pendidikan

Arah kebijakan pengembangan pendidikan dimaksudkan sebagai upaya peningkatan sumberdaya manusia, baik melalui pendidikan formal maupun informal. Sasaran dari kebijakan pembangunan bidang pendidikan meliputi: peningkatan angka partisipasi sekolah, pengurangan angka putus sekolah, peningkatan angka dan predikat kelulusan, peningkatan jumlah peserta didik yang masuk lapangan kerja, peningkatan keterampilan dan pengetahuan aparatur, peningkatan keterampilan dan pengetahuan pelaku usaha ekonomi, dan lain-lain. Termasuk dalam pengembangan sumberdaya manusia ini adalah pembinaan keimanan dan ketakwaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa.

Program/kegiatan yang dilakukan antara lain :

- 1) Peningkatan sarana dan prasarana pendidikan
- 2) Peningkatan kuantitas dan kualitas tenaga pendidik
- 3) Peningkatan kualitas dan kuantitas kegiatan belajar dan mengajar
- 4) Pembinaan lembaga penyelenggara pendidikan
- 5) Pengembangan keterampilan tenaga kerja dan kepemudaan
- 6) Bantuan pendidikan kemahasiswaan dan aparatur
- 7) Penyelenggaraan pendidikan aparatur
- 8) Pembinaan dan pengembangan iman dan taqwa
- 9) Pembinaan dan pengembangan budaya.

3. Kebijakan Peningkatan Kesehatan

Kebijakan pembangunan bidang kesehatan meliputi upaya perbaikan mutu kesehatan masyarakat melalui program/kegiatan sebagai berikut:

- 1) Pengadaan sarana dan prasarana kesehatan
- 2) Peningkatan mutu dan jangkauan pelayanan kesehatan
- 3) Pencegahan dan pemberantasan penyakit menular
- 4) Peningkatan dan perbaikan mutu gizi masyarakat dan memantapkan ketahanan pangan
- 5) Penyelenggaraan Keluarga Berencana
- 6) Perbaikan lingkungan permukiman/perumahan masyarakat
- 7) Pelestarian dan perbaikan mutu lingkungan alami.

4. Kebijakan Peningkatan Perhubungan

Kebijakan pembangunan bidang perhubungan dimaksudkan sebagai upaya memperlancar arus barang dan orang di wilayah kabupaten Pelalawan, yang selanjutnya akan menunjang pengembangan ekonomi rakyat. Program/kegiatan yang dilakukan meliputi:

- 1) Peningkatan sarana dan prasarana perhubungan
- 2) Peningkatan ketertiban dan pencegahan kecelakaan lalu lintas.

5. Kebijakan Peningkatan Aparatur

Kebijakan pembangunan aparatur di maksudkan sebagai upaya peningkatan pelayanan aparatur sebagai penyelenggara urusan pemerintahan,

pembangunan dan kemasyarakatan dengan mengutamakan mutu pelayanan melalui program/kegiatan:

- 1) Peningkatan sarana dan prasarana pemerintahan
- 2) Peningkatan motivasi dan disiplin kerja
- 3) Peningkatan kualitas dan kuantitas aparatur
- 4) Peningkatan sistem dan metode kerja

2. Konsep Operasional

Dari jabaran kerangka teoritis di atas, maka dapat dirumuskan konsep operasional sebagai acuan ataupun tolak ukur dalam penelitian di lapangan. Adapun indikator kinerja humas dalam mensukseskan program pemerintah adalah sebagai berikut:

1. Humas mampu melakukan pekerjaan sesuai dengan tanggungjawab yang diberikan kepadanya.
2. Kemampuan humas dalam memimpin tim kerja untuk menyelesaikan tugas.
3. Humas memiliki prestasi kerja yang dicapai dalam melaksanakan tugasnya.
4. Humas memiliki rasa kesetiaan dalam menaati dan melaksanakan tugas dengan penuh tanggungjawab.
5. Humas melakukan sosialisasi program pemerintah kepada masyarakat.
6. Humas menyebarluaskan informasi mengenai program pembangunan.

Mempergunakan saluran media informasi yang tepat dan terpercaya serta dipilih oleh khalayak sebagai target sasaran

7. Humas mampu untuk membuka hubungan dengan orang lain baik secara individu maupun dalam tim dan untuk menyampaikan serta menerima pesan, secara tatap muka ataupun tertulis.
8. Humas mampu menjadi komunikator dan mediator yang promotif dalam menjembatani kepentingan instansi pemerintah dan menampung aspirasi masyarakat.

F. Metodologi Penelitian

1. Jenis penelitian

Pada penelitian ini penulis menggunakan metode penelitian kualitatif. Dimana penelitian kualitatif merupakan jenis penelitian yang menghasilkan penemuan-penemuan yang tidak dapat dicapai dengan menggunakan prosedur statistik atau cara kuantifikasi lainnya (Ruslan, 2003: 202).

Menurut Bogdan dan Taylor (dalam Moleong, 2004: 4) metodologi penelitian kualitatif sebagai prosedur penelitian yang menghasilkan data deskriptif berupa kata-kata tertulis atau lisan dari orang-orang dan perilaku yang dapat diamati.

2. Lokasi Penelitian

Lokasi penelitian dilakukan di pemerintah Kabupaten Pelalawan jalan Sultan Syarif Hasyim II No. 1 Kabupaten Pelalawan Kerinci.

3. Subjek dan Objek Penelitian

- a. Subjek penelitian adalah pegawai humas pemerintah kabupaten Pelalawan
- b. Objek dalam penelitian ini adalah kinerja humas pemerintah kabupaten Pelalawan dalam melaksanakan program pemerintah.

4. Populasi dan Sampel

Adapun yang menjadi populasi dalam penelitian ini adalah seluruh staf humas pemerintah kabupaten Pelalawan yang berjumlah 10 orang. Karena jumlah populasinya sedikit, maka dalam hal ini penulis mengambil seluruh populasi untuk dijadikan *informen* dengan menggunakan teknik *total sampling*.

5. Jenis Data

- a. Data Primer

Data primer adalah data yang diperoleh langsung dari objek penelitian perorangan, ataupun kelompok berupa tanggapan tentang pertanyaan yang disampaikan peneliti. Terdapat dua metode dalam pengumpulan data primer yaitu melalui wawancara dan observasi (Ruslan, 2003: 138)

- b. Data sekunder

Data sekunder adalah data yang diperoleh dari instansi yang telah tersedia, yang terbentuk catatan atau laporan data dokumentasi (Ruslan, 2003: 138).

6. Teknik Pengumpulan Data

- a. Observasi adalah metode pengumpulan data dengan cara melakukan kunjungan dan pengamatan secara langsung dilokasi penelitian melalui pengamatan dan pengindraan (Bungin, 2008: 115).
- b. Wawancara yaitu cara pengumpulan data melalui tanya jawab langsung dengan personel dan untuk mendapatkan data sesuai dengan penelitian. Adapun yang akan diwawancarai yaitu pegawai humas pemerintah kabupaten Pelalawan.
- c. Dokumentasi adalah metode yang digunakan untuk menelusuri data historis (Bungin, 2008: 121). Dalam dokumentasi ini peneliti memanfaatkan arsip-arsip dan dokumen, buku-buku, majalah, koran, serta sumber bacaan lain yang berhubungan dengan penelitian.

7. Teknik Analisa Data

Untuk menganalisis terhadap perumusan yang ada digunakan metode analisis deskriptif kualitatif. Sesuai dengan pendekatan yang digunakan yaitu deskriptif, maka dalam menganalisa data yang berhasil dikumpulkan tidak digunakan uji statistik melainkan non statistik sesuai dengan penelitian yang bersifat kualitatif. Dezin dan Linclon menyatakan bahwa penelitian kualitatif adalah penelitian yang menggunakan latar belakang ilmiah dengan maksud menafsirkan fenomena yang terjadi dan dilakukan dengan jalan melibatkan berbagai metode seperti wawancara, pengamatan dan pemanfaatan dokumen (Moleong, 2004: 5).

G. Sistematika Penulisan

BAB I: Merupakan Bab Pendahuuan Yang Meliputi Latar Belakang Masalah, Alasan pemilihan Judul, Permasalahan, Tujuan dan Kegunaan Penelitian, Kerangka Teoritis dan Konsep Operasional, Metode Penelitian, Teknik Anaisa Data dan Sistematika Penulisan.

BAB II: Gambaran umum lokasi penelitian

BAB III: Penyajian Data

BAB IV : Analisa Data

BAB V : Penutup

Kesimpulan dan Saran

Lampiran

BAB II

GAMBARAN UMUM LOKASI PENELITIAN

A. Sejarah Kabupaten Pelalawan

Kabupaten Pelalawan dibentuk berdasarkan UU. No. 53 Tahun 1999, yang merupakan pemekaran dari kabupaten Kampar, dan diresmikan oleh menteri dalam negeri pada tanggal 12 Oktober 1999. Sementara peresmian operasionalnya dilakukan oleh Bapak Gubernur Riau pada tanggal 5 Desember 1999, dimana Pangkalan Kerinci sebagai ibu kota kabupaten Pelalawan.

Pembentukan kabupaten Pelalawan atas dasar kesepakatan dan kebulatan tekad bersama yang dilakukan melalui musyawarah besar masyarakat Kampar Hilir pada tanggal 11 s/d 13 April 1999 di Pangkalan Kerinci. Rapat tersebut menghadirkan seluruh komponen masyarakat yang terdiri dari tokoh masyarakat, tokoh pemuda, lembaga-lembaga adat, kaum intelektual, cerdik pandai dan alim ulama. Dari musyawarah besar tersebut ditetapkan Pelalawan yang bermula dari Kerajaan Pekantua, yang melepaskan diri dari Kerajaan Johor tahun 1699 M, kemudian berkuasa penuh atas daerah ini.

Luas Kabupaten Pelalawan 13.256,7 Km, yang sebagian besar wilayah terdiri dari daratan, dan sebagian lainnya kepulauan. Beberapa pulau besar yang ada di wilayah kabupaten Pelalawan diantaranya Pulau Mendul (Penyalai), Pulau Muda, Pulau Serapung, Pulau Lebu, dan Pulau-pulau kecil lainnya. Jumlah penduduk kabupaten Pelalawan mencapai 280.197 jiwa dengan

kepadatan penduduk 12 jiwa/km². Di kabupaten Pelalawan terdapat 12 Kecamatan, 106 Desa dan 12 Kelurahan. Desa-desa tersebut ada yang terletak di pinggiran Sungai, ada juga di perkebunan, dan transmigrasi (Sumber: Arsip humas pemerintah kabupaten Pelalawan).

Dilihat dari posisinya kabupaten Pelalawan terletak pada titik koordinat 0046,24 LU. Sampai dengan 0024,34 Lintas Selatan dan 10130,37 BT, sampai dengan 10321,36 BT, merupakan kawasan strategis yang dilewati jalur Lintas Timur Sumatera yang merupakan jalur ekonomi terpadat. Disamping itu kabupaten Pelalawan juga berbatasan langsung dengan wilayah Provinsi Kepulauan Riau tepatnya kecamatan Kundur kabupaten Karimun. Kemudian berdasarkan Surat Keputusan Gubernur Riau No. KPTS.528/XI/2000 tanggal 9 November tahun 2000 tentang diresmikannya keanggotaan DPRD kabupaten Pelalawan hasil Pemilu Tahun 1999 sebanyak 25 orang. Pengambilan sumpah dilaksanakan oleh Ketua Pengadilan Negeri Bangkinang atas nama Ketua MA RI tanggal 15 November tahun 2000.

Dengan terbentuknya Legislatif (DPRD) Kabupaten Pelalawan, maka pemilihan Bupati Pertama dilakukan pada tanggal 5 Maret 2001 melalui Sidang Paripurna, terpilihlah pasangan T.Azmun Jaafar, SH dengan ABD.Anas Badrun sebagai Bupati dan Wakil Bupati Pelalawan Periode 2001 s/d 2006. Pada tanggal 5 April 2004 diadakan Pemilihan Anggota DPRD Kabupaten Pelalawan secara langsung dipilih oleh rakyat, dari hasil pemilihan tersebut terbentuk DPRD Kabupaten Pelalawan dengan Surat Keputusan No.KPTS.508/VIII/2004

tentang Anggota Dewan Kabupaten Pelalawan Masa Jabatan 2004 – 2009 yang diresmikan pengangkatannya.

Setahun setelah Pemilihan Anggota DPRD tepatnya tanggal 8 Februari 2006 diadakan pemilihan Bupati/Wakil Bupati secara langsung dipilih oleh rakyat, hasil pemilihan tersebut memenangkan pasangan T.Azmun Jaafar dengan Rustam Effendi yang kemudian di kukuhkan dengan Keputusan Menteri Dalam Negeri No.131-14-94 Tahun 2006 tentang pengesahan pemberhentian dan pengangkatan Bupati Pelalawan Provinsi Riau. Kabupaten Pelalawan terletak di pesisir Timur Pulau Sumatera, dengan wilayah daratan yang membentang di sepanjang bagian Hilir Sungai Kampar serta berdekatan dengan Selat Malaka. Secara geografis Kabupaten Pelalawan terletak antara 1°25" LU dan 0°,20" LS serta antara 100°,42" ~ 103°,28" BT dengan batas-batas wilayah :

- Sebelah Utara : berbatasan dengan Kabupaten Siak
- Sebelah Selatan : berbatasan dengan Kabupaten Indragiri Hulu dan Kabupaten Indragiri Hilir
- Sebelah Barat : berbatasan dengan Kota Pekanbaru dan Kabupaten Kampar
- Sebelah Timur : berbatasan dengan Kabupaten Kepulauan Riau

Profil Wilayah

Luas kabupaten Pelalawan adalah 13.256,7 Km². Secara geografis, Pelalawan berada di 00° 46,24' LU sampai 00° 24,34 LS dan 101° 30,37' BT sampai dengan 103° 21,36'. Kabupaten Pelalawan pada dasarnya terdiri dari

daratan, dan perairan. Adapun daratan merupakan perbukitan dan dataran, sedangkan perairan terdiri dari Sungai, dan laut. Kabupaten Pelalawan memiliki beberapa pulau yang relatif besar, diantaranya Pulau Mendul, Pulau Serapung, Pulau Lebu, Pulau Muda dan beberapa pulau kecil, seperti Pulau Ketam, Pulau Tugau dan Pulau Labu

Batas Administratif:

Sebelah Utara dengan kabupaten Siak. Sebelah Selatan dengan kabupaten Indragiri Hulu dan Indragiri Hilir. Sebelah Barat dengan Kabupaten Kampar dan Indragiri Hulu. Sebelah Timur dengan Kabupaten Karimun, Kabupaten Kepri dan Kabupaten Bengkalis. Kabupaten Pelalawan terdiri dari 12 kecamatan, 4 kecamatan definitif, sedangkan lainnya merupakan kecamatan pembantu.

Kecamatan definitif:

1. Langgam, luas 1.450 Km²
2. Bunut, luas 414,7 Km²
3. Pangkalan Kuras, luas 1.185 Km²
4. Kuala Kampar, luas 806,4 Km²

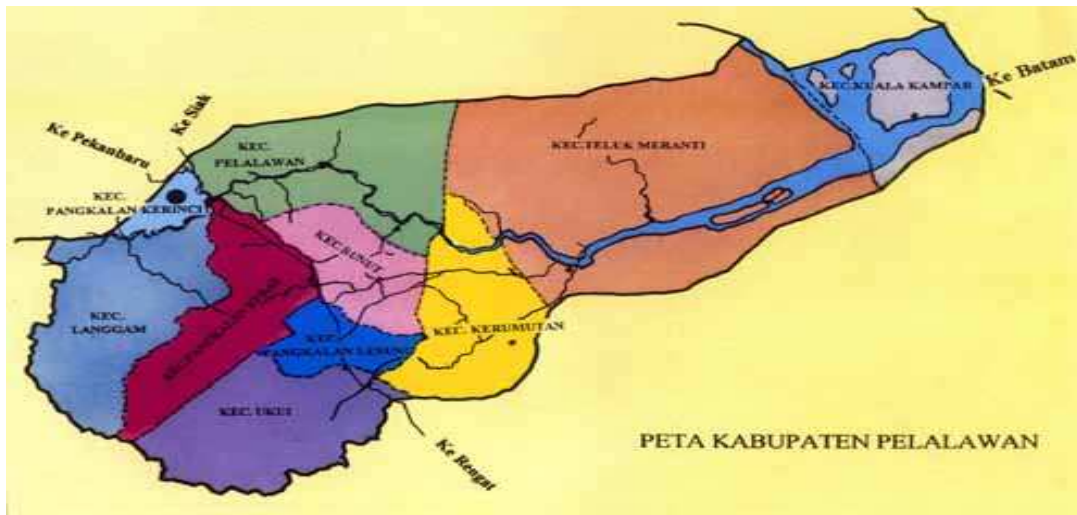
Kecamatan pembantu:

1. Pangkalan Kerinci, luas 192,5 Km²
2. Ukui, luas 1.302,0 Km²
3. Pelalawan, luas 1.496,0 Km²
4. Pangkalan Lesung, luas 506,2 Km²
5. Kerumutan, luas 963,8 Km²
6. Teluk Meranti, luas 4.246,0 Km²
7. Kecamatan Bandar Petalangan, Luas 373,3 Km²
8. Kecamatan Bandar Sekijang, Luas 320,8 Km²

Struktur wilayah merupakan daratan rendah dan bukit-bukit. Dataran rendah membentang kearah Timur dengan luas wilayah mencapai 93 persen dari total keseluruhan. Secara fisik sebagian wilayah ini merupakan daerah konservasi dengan karakteristik tanah pada bagian tertentu bersifat asam dan merupakan tanah organik, air tanahnya payau, kelembaban dan temperatur udara agak tinggi.

Jumlah penduduk kabupaten Pelalawan hasil proyeksi yang dilakukan oleh BPS Pelalawan tahun 2008 adalah 280.197 jiwa, yang terdiri dari 145.442 orang laki-laki (51,54%) dan 134.775 orang perempuan (48,46%). Mayoritas penduduk memeluk agama Islam yakni 257.447 jiwa dan lainnya beragama Protestan, Katolik, Hindu dan Budha. Mata pencaharian cukup beragam, diantaranya sebagai, pengusaha, pedagang, buruh, petani, nelayan, tukang, dan lain-lain.

PETA KABUPATEN PELALAWAN



Sumber : Data Olahan Oleh Bagian PDE Sekretariat Daerah Kabupaten Pelalawan

Luas kabupaten Pelalawan adalah 12.490,42 Km². Secara geografis, Pelalawan berada di 00° 46,24' LU sampai 00° 24,34 LS dan 101° 30,37' BT sampai dengan 103° 21,36'. Sebagian besar wilayahnya adalah daratan dan hanya sebagian kecil yang berupa perairan. Pelalawan memiliki beberapa pulau yang relatif besar, diantaranya pulau Mendul, Pulau Serapung, pulau Lebu, pulau Muda dan beberapa pulau kecil seperti Pulau Ketam, Pulau Tugau dan Pulau Labu.

Sebagian besar daratan wilayah kabupaten Pelalawan merupakan dataran rendah dan sebagian merupakan daerah perbukitan yang bergelombang. Secara umum ketinggian beberapa daerah/kota berkisar antara 3 ~ 6 meter, dengan kemiringan lahan rata-rata $\pm 0 \sim 15\%$ dan 15 ~ 40%. Daerah/kota yang tinggi

adalah Sorek I dengan ketinggian ± 6 meter dan yang terendah adalah Teluk Dalam (Kecamatan Kuala Kampar) dengan ketinggian ± 3.5 meter. Di wilayah Kabupaten Pelalawan terdapat sebuah Sungai Kampar yang panjangnya ± 413.5 Km, dengan kedalaman rata-rata $\pm 7,7$ meter dan lebar rata-rata ± 143 meter. Sungai ini dan anak sungainya berfungsi sebagai prasarana perhubungan, sumber air bersih, budi daya perikanan dan irigrasi.

Wilayah dataran rendah kabupaten Pelalawan pada umumnya merupakan dataran rawa gambut, dataran aluvium sungai dengan daerah dataran banjirnya. Dataran ini dibentuk oleh endapan aluvium muda dan aluvium tua yang terdiri dari endapan pasir, danau, lempung, sisa tumbuhan dan gambut. Sedangkan wilayah berikut dan bergelombang tanahnya termasuk jenis organosol (hostosal) dan humus yang mengandung bahan organik. Jumlah penduduk Kabupaten Pelalawan berdasarkan rekapitulasi Bagian Pemerintah Sekretariat Daerah Kabupaten Pelalawan Tahun 2009 adalah 280.197 jiwa. Mata pencaharian cukup beragam, diantaranya sebagai buruh, petani, nelayan, tukang, pencari kayu dan lain-lain.

**LUAS WILAYAH, JUMLAH PENDUDUK, DAN KEPADATAN
PENDUDUK PER KM2 PER KECAMATAN DI KABUPATEN
PELALAWAN TAHUN 2009**

Kecamatan	Luas Wilayah (Km2)	Jumlah Penduduk	Kepadatan Penduduk
Langgam	1.450	15.497	11
Bandar Sei Kijang	320,8	13,857	39
Pangkalan Kerinci	192,5	68,652	336
Bunut	414,7	10,590	23
Pelalawan	1.496	12.970	8
Bandar Petalangan	373,3	12,789	33
Pangkalan Kuras	1.185	39,638	33
Pangkalan Lesung	506,2	21,999	40
Ukui	1.302	27,323	21
Kuala Kampar	806,4	21,360	24
Kerumutan	963,8	16,211	17
Teluk Meranti	4.246	18,694	3
Jumlah	13.256,7	280.197	49

Sumber : Data Olahan Oleh Bagian PDE Sekretariat Daerah Kabupaten Pelalawan

B. Visi dan Misi Kabupaten Pelalawan

Adapun dalam mendirikan kabupaten Pelalawan Pemerintah memiliki visi dan misi yang sangat jelas dimana visi kabupaten Pelalawan adalah: “Terwujudnya Kabupaten Pelalawan Maju dan Sejahtera, Melalui Pemberdayaan Ekonomi Kerakyatan Yang di dukung oleh Pertanian yang unggul dan industri yang Tangguh Dalam Masyarakat Yang Beradat, Beriman, Bertakwa Dan Berbudaya Melayu Tahun 2030 “

Rumusan Visi tersebut diatas mengandung makna sebagai berikut :

1. Kabupaten Pelalawan yang maju dan sejahtera
2. pemberdayaan Ekonomi Kerakyatan
3. Pertanian yang ungu
4. Industri yang tangguh
5. Masyarakat beriman dan bertaqwa serta bebudaya melayu

Misi Kabupaten Pelalawan

1. Meningkatkan kualitas kehidupan dengan terpenuhinya kebutuhan dasar, sandang pangan, papan, pendidikan, kesehatan, bermartabat dan berbudaya.
2. Menciptakan lapangan kerja yang meningkatkan pendapatan masyarakat masyarakat melalui pembangunan usaha ekonomi kerakyatan.
3. Meningkatkan hasil dan mutu pertanian melalui pemanfaatan teknologi berbasis agrobisnis serta pengelolaan hutan-hutan yang lestari.
4. Menciptakan dan membina industri yang mampu menghasilkan produk yang berdaya saing dan berwawasan lingkungan.

5. Peningkatan pengamalan ajaran agama dalam kehidupan sehari-hari melalui pendidikan agama dan memfungsikan lembaga-lembaga keagamaan sebagai wadah pembinaan umat (Sumber: Arsip Humas Pemerintah Kabupaten Pelalawan)

C. Tugas Humas Pemerintah Kabupaten Pelalawan

Bagian Hubungan masyarakat mempunyai tugas merumuskan dan melaksanakan kebijakan bidang Pengelolaan Data Pengumpulan Informasi, Berita dan Dokumentasi serta hubungan antar lembaga dan organisasi masyarakat.

Untuk melaksanakan tugas bagian hubungan masyarakat mempunyai tugas:

1. Membantu Pemerintah Daerah dalam melancarkan arus informasi antar lembaga pemerintah dan antar pemerintah dan masyarakat.
2. Mengadakan koordinasi dan kerjasama antar instansi lain bagi instansi vertikal maupun BUMN maupun BUMD
3. Merencanakan dan melaksanakan kegiatan kehumasan.
4. Sebagai aparat pemerintah di bidang kehumasan untuk menjaga dan menciptakan organisasi yang baik serta menyebarluaskan kebijakan pemerintah serta membina hubungan baik dan harmonis antara pemerintah dan masyarakat.

Hubungan masyarakat terdiri dari:

1. Sub Bagian Pengelolaan Data Pengumpulan Informasi
2. Sub Bagian Berita dan Hubungan Dokumentasi
3. Sub Bagian Hubungan antar lembaga dan Organisasi Masyarakat

Sub bagian Pengelolaan Data Pengumpulan Informasi mempunyai tugas:

1. Mencari, mengumpulkan, menghimpun, dan mengolah data serta informasi yang berhubungan dengan bidang pengumpulan informasi.
2. Menyiapkan bahan penyusunan kebijakan, pedoman, dan petunjuk teknis dibidang pengumpulan informasi.
3. Menginventarisasi permasalahan-permasalahan yang berhubungan dengan bidang pengumpulan informasi dan menyiapkan bahan petunjuk pemecahan masalah.
4. Mencari, mengumpulkan data, menyaring dan menganalisa informasi bidang tugas dan kegiatan pemerintah daerah.
5. Menyusun dan mensistematisasikan data dibidang pemerintahan, pembangunan dan kemasyarakatan.
6. Mengolah data dan informasi dibidang pemerintahan, pembangunan dan kemasyarakatan.
7. Mengumpulkan, menyaring, dan menganalisa informasi dari masyarakat, organisasi non pemerintah dan *Pers.*

8. Mengevaluasi dan menganalisa segala usaha kegiatan yang berkaitan dengan masalah kehumasan.

Sub Bagian Berita dan Dokumentasi mempunyai tugas:

1. Menyusun rencana kerja sub bagian berita dan dokumentasi
2. Menyiapkan bahan untuk penyusunan pedoman dan petunjuk teknis pelaksanaan peliputan dan dokumentasi
3. Menyiapkan bahan koordinasi dalam rangka memperjelas kegiatan pemerintah daerah kepada pihak eksternal
4. Melaksanakan penyebaran berita dan informasi
5. Mendokumentasikan berita dan informasi kegiatan Pemerintah Daerah
6. Menyusun sistem dokumentasi dan inventarisasi informasi dalam bentuk file aneka media
7. Menyiapkan bahan koordinasi dengan semua pihak dalam rangka pengumpulan dan penyebaran informasi kegiatan Pemerintah Daerah
8. Melaksanakan dokumentasi aneka prestasi dan informasi taktis strategis untuk bahan publikasi Pemerintah Daerah
9. Melaksanakan dokumentasi aneka prestasi dan informasi taktis strategis untuk bahan publikasi Pemerintah Daerah
10. Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Bagian sesuai dengan tugas dan fungsinya

Sub Bagian Hubungan Antar Lembaga dan Organisasi Masyarakat mempunyai tugas:

1. Menyusun rencana kerja sub bidang hubungan lembaga dan organisasi masyarakat
2. Melaksanakan pembinaan organisasi politik, organisasi kemasyarakatan dan lembaga swadaya masyarakat serta menciptakan harmonis hubungan antar lembaga.
3. Melaksanakan inventarisasi organisasi kemasyarakatan dan LSM.
4. Melakukan pembinaan terhadap organisasi kemasyarakatan dan LSM
5. Melaksanakan pengembangan forum bersama organisasi kemasyarakatan dan LSM
6. Memfasilitasi pelaksanaan dialog rutin antar lembaga keagamaan, organisasi kemasyarakatan dan LSM.
7. Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh atasan sesuai tugas dan fungsinya (Sumber: Arsip Humas Pemerintah Kabupaten Pelalawan).

D. Program Humas Pemerintah Kabupaten Pelalawan

Program merupakan kumpulan kegiatan nyata, sistematis dan terpadu yang dilaksanakan oleh bagian humas guna mencapai tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan.

Hal-hal yang menjadi penetapan program adalah:

1. Program pemerintah kabupaten Pelalawan

2. Program Sekretariat Daerah Kabupaten Pelalawan
3. Tugas pokok dan fungsi humas
4. Skala prioritas yang menunjang visi dan misi

Program bagian humas pemerintah kabupaten Pelalawan yang telah ditetapkan adalah sebagai berikut:

1. Program peningkatan akses informasi

Program ini bertujuan meningkatkan ketersediaan dan kemudahan dalam akses informasi tentang pemerintah dan pembangunan kabupaten Pelalawan. kegiatan program ini adalah:

- a. Menyusun teks sambutan Bupati
- b. Pemberitaan di penerbitan pers dan media elektronik
- c. Pembuatan kliping tentang informasi pemerintahan, pembangunan, dan kemasyarakatan dari media cetak yang menyangkut pemerintah kabupaten Pelalawan.
- d. Pembuatan foto dan VCD tentang kegiatan pemerintah dan pembangunan di kabupaten Pelalawan.
- e. Penyusunan analisa informasi kehumasan dan kebijakan pemerintah kabupaten Pelalawan.

2. Program Peningkatan jangkauan Penyebarluasan Informasi Publik

Program ini bertujuan meningkatkan pemerataan dan mutu informasi komunikasi kepada masyarakat khususnya yang berada diwilayah kabupaten Pelalawan. kegiatan program ini adalah:

- a. Penyebaran informasi melalui surat kabar
- b. Penyebaran informasi melalui media luar ruang
- c. Penyusunan *Press Realease*
- d. Melaksanakan kemitraan dengan pers dalam peliputan dan pemberitaan.

3. Program Peningkatan Kualitas Sumberdaya Aparatur

Program ini bertujuan meningkatkan kemampuan dan ketrampilan petugas/pegawai. Kegiatan program ini adalah:

- a. Mengikutsertakan diklat yang diselenggarakan oleh pemerintah pusat, pemerintah daerah, atau oleh pihak lainnya.
- b. Melakukan pembinaan pelaksanaan tugas secara berkelanjutan.

Rencana Strategis:

1. Peningkatan akses informasi
 - a. Menerbitkan media komunikasi internal melalui pembuatan buku kerja
 - b. Menyusun teks sambutan Bupati Pelalawan
 - c. Pemberitaan di media cetak dan elektronik
 - d. Pembuatan dokumentasi seperti foto dan VCD
2. Peningkatan Kualitas Jangkauan Penyebaran Informasi Publik
 - a. Penyebaran informasi melalui kemitraan dengan pers
 - b. Penyebaran informasi melalui media luar ruang: Spanduk dan Baliho

c. Penyusunan *Pers Releas*

d. Melaksanakan kemitraan dengan pers dalam peliputan dan pemberitaan.

3. Peningkatan Sumberdaya Aparatur

Mengintruksika pada:

a. Diklat III dan IV

b. Diklat Teknis Fungsional

c. Pembinaan Staf

BAB III

PENYAJIAN DATA

Dalam penelitian ini, untuk menyaring data yang diperlukan guna menjawab permasalahan yang telah penulis paparkan dalam perumusan masalah pada Bab I, menggunakan teknik wawancara, observasi dan dokumentasi dengan tujuan untuk memperoleh data mengenai kinerja Humas Pemerintah Kabupaten Pelalawan dalam Menyukkseskan Program Pemerintah.

Wawancara dilaksanakan dengan cara komunikasi secara langsung dengan mengajukan beberapa pertanyaan yang berhubungan dengan permasalahan dalam penelitian ini, wawancara dilakukan dengan kepala bagian Humas dan Kasubag Humas bagian Pengumpulan Data Pengolaan Informasi, Kasubag Humas bagian Berita dan Dokumentasi.

Dokumentasi adalah salah satu teknik pengambilan data yang penulis gunakan sebagai data pelengkap yang diambil dari dokumen-dokumen instansi, yang dapat menambah keakuratan data dari hasil wawancara dan observasi.

Observasi yang penulis lakukan dengan cara mengamati secara langsung kinerja Humas Pemerintah Kabupaten Pelalawan serta mengamati perkembangan berita Pembangunan Pelalawan melalui koran-koran dan serta arsip instansi.

A. Kinerja Humas Pemerintah Kabupaten Dalam Menyukseskan Program Pemerintah

Sesuai dengan hasil wawancara peneliti, dengan Kabag Humas Setda Pemerintah Kabupaten Pelalawan pada tanggal 10 Mei 2010 yakni Bapak Abu Bakar S.Sos, M.Ap menurut beliau Humas merupakan corongnya Pemerintah untuk menyampaikan informasi mengenai pembangunan, baik pembangunan fisik maupun SDM kepada masyarakat, serta membantu pemerintah untuk menciptakan suasana yang kondusif antara pihak pemerintah dan masyarakat.

Untuk menciptakan itu semua seorang humas tidak bisa bekerja dengan sendirinya. Tanpa bantuan dari sub-sub bagian dan bekerja sama dengan pihak media baik itu media cetak maupun elektronik. Oleh karena itu humas pemerintah kabupaten Pelalawan memiliki sub-sub bagian yang bertugas membantu kinerja dari humas diantaranya:

1. Sub Bagian Pengumpulan Data Pengelolaan informasi mempunyai Tugas:
 - a. Mencari, mengumpulkan, menghimpun, dan mengolah data serta informasi yang berhubungan dengan bidang pengumpulan informasi.
 - b. Menyiapkan bahan penyusunan kebijakan, pedoman, dan petunjuk teknis dibidang pengumpulan informasi.
 - c. Menginventarisasi permasalahan-permasalahan yang berhubungan dengan bidang pengumpulan informasi dan menyiapkan bahan petunjuk pemecahan masalah.

- d. Mencari, mengumpulkan data, menyaring dan menganalisa informasi bidang tugas dan kegiatan pemerintah daerah.
 - e. Menyusun dan mensistematisasikan data dibidang pemerintahan, pembangunan dan kemasyarakatan.
 - f. Mengolah data dan informasi dibidang pemerintahan, pembangunan dan kemasyarakatan.
 - g. Mengumpulkan, menyaring, dan menganalisa informasi dari masyarakat, organisasi non pemerintah dan *Pers*.
 - h. Mengevaluasi dan menganalisa segala usaha kegiatan yang berkaitan dengan masalah kehumasan.
2. Sub Bagian Berita dan Dokumentasi mempunyai tugas:
- a. Menyusun rencana kerja sub bagian berita dan dokumentasi
 - b. Menyiapkan bahan untuk penyusunan pedoman dan petunjuk teknis pelaksanaan peliputan dan dokumentasi
 - c. Menyiapkan bahan koordinasi dalam rangka memperjelas kegiatan pemerintah daerah kepada pihak eksternal
 - d. Melaksanakan penyebaran berita dan informasi
 - e. Mendokumentasikan berita dan informasi kegiatan Pemerintah Daerah
 - f. Menyusun sistem dokumentasi dan inventarisasi informasi dalam bentuk file aneka media
 - g. Menyiapkan bahan koordinasi dengan semua pihak dalam rangka pengumpulan dan penyebaran informasi kegiatan Pemerintah Daerah

- h. Melaksanakan dokumentasi aneka prestasi dan informasi taktis strategis untuk bahan publikasi Pemerintah Daerah
 - i. Melaksanakan dokumentasi aneka prestasi dan informasi taktis strategis untuk bahan publikasi Pemerintah Daerah
 - j. Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Bagian sesuai dengan tugas dan fungsinya.
3. Sub Bagian Lembaga Antar Lembaga dan Organisasi Masyarakat mempunyai tugas:
- a. Menyusun rencana kerja sub bidang hubungan lembaga dan organisasi masyarakat
 - b. Melaksanakan pembinaan organisasi politik, organisasi kemasyarakatan dan lembaga swadaya masyarakat serta menciptakan harmonis hubungan antar lembaga.
 - c. Melaksanakan inventarisasi organisasi kemasyarakatan dan LSM.
 - d. Melakukan pembinaan terhadap organisasi kemasyarakatan dan LSM
 - e. Melaksanakan pengembangan forum bersama organisasi kemasyarakatan dan LSM
 - f. Memfasilitasi pelaksanaan dialog rutin antar lembaga keagamaan, organisasi kemasyarakatan dan LSM.

Program pemerintah tidak akan berjalan dengan baik tanpa adanya partisipasi dan dukungan masyarakat, maka dari itu sudah menjadi wewenang dan tanggungjawab Humas Pemerintah Kabupaten Pelalawan

untuk menyebarluaskan informasi mengenai program Pemerintah kepada masyarakat agar masyarakat dapat berpartisipasi dengan baik. Berikut wawancara dengan Humas Bapak Abu Bakar S. Sos, M.Ap tanggal 10 Mei 2010 tentang tugas dan tanggungjawab humas.

Humas pemerintah kabupaten Pelalawan dalam menyukseskan program pemerintah bertanggungjawab dalam menginformasikan kegiatan dan kebijakan pemerintah yang akan dipublikasikan kepada masyarakat. Maka dari itu program Humas tidak lepas dari:

1. Menyebarluaskan informasi kepada masyarakat tentang kegiatan dan kebijakan pemerintah yang menyangkut kepentingan masyarakat banyak.
2. Mengajak masyarakat untuk turut serta memberikan masukan-masukan dan penilaian terhadap kegiatan Pemerintah.
3. Meyakinkan masyarakat tentang maksud dan tujuan serta kegunaan pembangunan bagi masyarakat.
4. Mendokumentasikan kegiatan pokok Pemerintah kabupaten Pelalawan.

Sedangkan tugas pokok dan fungsi bagian Humas dalam menyelenggarakan pemerintah yang sesuai dengan rencana Sekretariat Daerah adalah:

1. Membantu Pemerintah Daerah dalam melancarkan arus informasi antar lembaga pemerintah dan antar pemerintah dan masyarakat.

2. Mengadakan koordinasi dan kerjasama antar instansi lain baik instansi vertikal maupun BUMN maupun BUMD
3. Merencanakan dan melaksanakan kegiatan kehumasan.
4. Sebagai aparat pemerintah di bidang kehumasan untuk menjaga dan menciptakan organisasi yang baik serta menyebarluaskan kebijakan pemerintah serta membina hubungan baik dan harmonis antara pemerintah dan masyarakat.

Untuk mendukung kinerja Humas dalam menyebarluaskan informasi mengenai program Pemerintah kabupaten Pelalawan, humas menggalang kerjasama dengan mengadakan pembinaan terhadap media massa, baik media cetak maupun elektronik. Hal ini dapat dilihat dari ruangan humas yang hampir setiap hari dipadati oleh wartawan dari berbagai media. Dengan tujuan untuk mendapat informasi mengenai kebijakan Pemerintah kabupaten Pelalawan.

Bapak Akmamul Hadi S.Sos Kasubag Berita dan Dokumentasi, menjelaskan media yang digunakan humas dalam menginformasikan Program pemerintah kabupaten Pelalawan yaitu menggunakan media cetak maupun elektronik. Media cetak yang digunakan ada harian dan mingguan.

1. Media cetak

- a. Media cetak harian terdiri dari: Riau Pos, Riau Mandiri, Metro Riau, Media Indonesia, Media Riau, Tribune Pekanbaru, Pekanbaru Pos, Rakyat Riau, Riau Pesisir, Koran Riau, Vokal.

- b. Media cetak mingguan terdiri dari: Pelalawan Tribune, Intermezo, Azam, Genta, Horas Plus, Utusan Melayu, Senior, Bidik, Fokus, Moral, Media Demokrat, Melayu Pos, Kibar Pelalawan, Binar.
2. Media Elektronik terdiri dari: RTV, TVRI, TV One, Metro Indonesia, RRI, Riau Gemuruh, Riau Terkini. (hasil wawancara, tanggal 4 Mei 2010).

Untuk menginformasikan program Pemerintah Humas Pemerintah kabupaten Pelalawan menyiapkan promosi kabupaten melalui media cetak dan media elektronik. Berbagai macam media lain yang digunakan untuk promosi kabupaten seperti Riau Gemuruh, Riau Terkini, situs Jamrud.

Adapun bentuk informasi program pemerintah yang disampaikan Humas pemerintah kabupaten Pelalawan melalui beberapa cara yakni:

1. Pemberitahuan melalui media cetak maupun elektronik mengenai pembangunan Pelalawan agar masyarakat mengetahui adanya program pemerintah.
2. Membuat baleho mengenai visi dan misi kabupaten Pelalawan.
3. Membuat brosur yang berisikan pembangunan daerah.
4. Membuat website untuk promosi kabupaten Pelalawan.

Menurut kabag humas Bapak Abu Bakar S.Sos, M.Ap upaya yang dilakukan humas dalam mensosialisasikan program pemerintah yaitu dengan cara sosialisasi melalui media massa baik media cetak maupun elektronik. Humas sudah melakukan upaya dalam menginformasikan program

pemerintah yakni program pembangunan Pelalawan, saat ini sudah ada Rubrik Pelalawan yang setiap harinya mengekspos pembangunan Pelalawan (hasil wawancara, tanggal 4 Mei 2010).

Program bagian humas pemerintah kabupaten Pelalawan yang telah ditetapkan adalah sebagai berikut:

1. Program peningkatan akses informasi

Program ini bertujuan meningkatkan ketersediaan dan kemudahan dalam akses informasi tentang pemerintah dan pembangunan kabupaten Pelalawan. kegiatan program ini adalah:

- a. Menyusun teks sambutan Bupati
- b. Pemberitaan di penerbitan pers dan media elektronik
- c. Pembuatan kliping tentang informasi pemerintahan, pembangunan, dan kemasyarakatan dari media cetak yang menyangkut pemerintah kabupaten Pelalawan.
- d. Pembuatan foto dan VCD tentang kegiatan pemerintah dan pembangunan di kabupaten Pelalawan.
- e. Penyusunan analisa informasi kehumasan dan kebijakan pemerintah kabupaten Pelalawan.

2. Program Peningkatan jangkauan Penyebarluasan Informasi Publik

Program ini bertujuan meningkatkan pemerataan dan mutu informasi komunikasi kepada masyarakat khususnya yang berada diwilayah kabupaten Pelalawan. kegiatan program ini adalah:

- a. Penyebaran informasi melalui surat kabar
- b. Penyebaran informasi melalui media luar ruang
- c. Penyusunan *Press Realease*
- d. Melaksanakan kemitraan dengan pers dalam peliputan dan pemberitaan.

3. Program Peningkatan Kualitas Sumberdaya Aparatur

Program ini bertujuan meningkatkan kemampuan dan ketrampilan petugas/pegawai. Kegiatan program ini adalah:

- a. Mengikutsertakan diklat yang diselenggarakan oleh pemerintah pusat, pemerintah daerah, atau oleh pihak lainnya.
- b. Melakukan pembinaan pelaksanaan tugas secara berkelanjutan.

Di tahun 2010 jumlah media yang digunakan berjumlah 67 media cetak dan 7 media elektronik, di banding tahun 2009 media tahun ini bertambah. Tahun lalu media yang digunakan untuk promosi hanya berjumlah 40 media cetak dan 4 media elektronik, walaupun untuk dana menurun, namun untuk kerja di bidang promosi meningkat, buktinya tahun 2009 koran hanya 40 sekarang sudah 67 sedangkan untuk media elektronik tahun lalau 4 sekarang sudah 7 media elektronik (wawancara Humas, tanggal 10 Mei 2010)

B. Faktor Pendukung dan Penghambat Kinerja Humas Dalam Menyukseskan Progam Pemerintah

1. Faktor Pendukung

Kinerja Humas Pemerintah Kabupaten Pelalawan dalam melaksanakan tugasnya tidak lepas dari faktor-faktor tertentu, di mana ada faktor penghambat dan pendukung dalam melaksanakan aktivitas humas. Menurut Bapak Akmamul Kasubag Berita dan Dokumentasi menjelaskan faktor-faktor pendukung kinerja Humas diantaranya:

Inventaris untuk kegiatan Publikasi didukung oleh sarana dan prasarana yang lengkap diantaranya:

- a. 2 unit mobil operasional digunakan untuk memperlancar kegiatan Humas, seperti membawa wartawan untuk meliput kegiatan pemerintah kabupaten Pelalawan.
- b. 3 unit kamera video digunakan untuk mendokumentasikan kegiatan Pemerintah kabupaten Pelalawan melalui media elektronik.
- c. 3 unit kamera digital digunakan untuk mendokumentasikan kegiatan Pemerintah kabupaten Pelalawan dan selanjutnya di publikasikan kepada masyarakat melalui media.
- d. 3 unit laptop digunakan oleh humas dan Kasubag humas untuk menyelesaikan tugas mereka.

- e. 4 unit komputer digunakan untuk bahan pemberitaan dan pembuatan surat-surat, untuk menyimpan data dan lain sebagainya.
- f. Dilengkapi dengan jaringan internet. Dengan adanya jaringan internet mempermudah kinerja humas, karena sudah ada website untuk memantau pembangunan Pelalawan.
- g. Adanya hubungan yang baik dengan media.

Selain adanya sarana dan prasarana faktor lain yang menjadi pendukung kinerja humas adalah terjalinnya hubungan baik dengan media baik media cetak maupun elektronik. Berikut kutipan wawancara dengan Bapak Indra Gunawan S.Ag, mengenai hubungan yang terjalin dengan pihak media.

Humas dan media itu adalah sebagai mitra dalam rangka penyebaran informasi pada masyarakat, dengan menjalin hubungan baik, maka diharapkan akan terjalin kerjasama yang baik, kegiatan dan tujuan pun akan terlaksana dengan baik pula (hasil wawancara dengan 4 Mei 2010).

Adanya kerjasama yang baik dengan media, baik media cetak maupun elektronik akan mempermudah kinerja humas dalam menyelesaikan program pemerintah. Hal ini dibuktikan dengan prestasi yang telah di dapat oleh humas yaitu humas mendapatkan Pin Emas sebuah penghargaan dari Persatuan Wartawan Indonesia (PWI) karena telah menjalin hubungan baik dengan media

(hasil wawancara dengan Kasubag Pengumpulan Data Pengelolaan Publikasi Bapak Indra Gunawan S.Ag, tanggal 10 Mei 2010)

2. Faktor Penghambat

Adapun faktor yang menghambat keberhasilan Humas Pemerintah Kabupaten Pelalawan dalam menyukseskan program Pemerintah sesuai penjelasan Bapak Akmamul Hadi S.Sos, M.Si, faktor-faktor penghambat kinerja Humas diantaranya:

1. Sumber Daya Manusia (SDM)

Salah satu yang menjadi faktor penghambat dalam melaksanakan kinerja humas pemerintah kabupaten Pelalawan adalah masih sedikitnya pegawai humas yang memiliki *skil* di bidang kehumasan baik pendidikan formal ataupun informal terbatas. Serta masih kurangnya jumlah personil pegawai humas.

Dengan keadaan seperti itu tentu akan menjadi penghambat kinerja humas, namun sudah ada upaya Humas untuk mengatasinya.

Untuk mengatasi hal tersebut, dalam segi personil saat ini Humas sudah meminta tambahan satu orang personil, dan sudah ada dalam satu minggu ini. Sedangkan dalam segi *skil* dengan mengikuti pelatihan di provinsi maupun di luar daerah (hasil wawancara dengan Kasubag Berita dan Dokumentasi, tanggal 10 Mei 2010)

2. Kurangnya dana untuk kegiatan Humas

Kurangnya dana untuk kegiatan Humas merupakan salah satu faktor penghambat kinerja Humas. Berikut kutipan wawancara dengan kabag Humas.

Secara global semua kegiatan perlu dana, untuk tahun ini dana APBD turun 40% dibandingkan tahun 2009, namun kegiatan humas tetap berjalan tetapi tidak sama dengan tahun lalu. Upaya untuk menangani ini Humas memanfaatkan dana yang ada untuk tahun 2010, dan merekrut rekan-rekan media untuk tetap eksis dalam menginformasikan program pemerintah (hasil wawancara dengan humas, tanggal 10 Mei 2010).

BAB IV

ANALISIS DATA

Apabila data telah disajikan pada Bab III, maka selanjutnya data tersebut akan dianalisis sesuai dengan permasalahan untuk mengetahui Kinerja Humas Pemerintah Kabupaten Pelalawan dan Faktor pendukung serta Penghambat keberhasilan Humas dalam melaksanakan program pemerintah. Sebagaimana yang telah dijelaskan pada Bab I dalam penelitian ini. Penulis menggunakan metode deskriptif kualitatif dengan cara menggambarkan data yang kemudian dianalisis sesuai dengan data yang penulis dapat.

A. Kinerja Humas Pemerintah Kabupaten Pelalawan Dalam Menyelenggarakan Program Pemerintah.

Kinerja adalah hasil kerja secara kualitas dan kuantitas yang dicapai oleh seorang pegawai, instansi, dalam melaksanakan tugasnya sesuai dengan tanggung jawab yang diberikan kepadanya (Mangkunegara, 2006: 27).

Sedangkan menurut Amstrong dan Baron (dalam Wibowo, 2007: 2) menyatakan bahwa kinerja merupakan hasil pekerjaan yang mempunyai makna lebih luas, bukan hanya menyatakan sebagai hasil kerja, tetapi juga bagaimana proses kerja berlangsung. Kinerja adalah tentang melakukan pekerjaan dan hasil yang dicapai melalui pekerjaan tersebut. Kinerja adalah tentang apa yang dikerjakan dan bagaimana cara mengerjakannya.

Bagian humas pada pemerintahan dibentuk untuk mempublikasikan atau mempromosikan kebijakan-kebijakan. Berfungsi untuk memberikan informasi tentang kebijakan, rencana dan hasil kerja institusi bersangkutan serta memberikan pengertian kepada publik tentang peraturan atau perundang-undangan dan segala sesuatu yang berpengaruh terhadap kehidupan masyarakat.

Sesuai dengan hasil wawancara peneliti, dengan kabag humas Setda Pelalawan Bapak Abu Bakar S.Sos, M.Ap menurut beliau humas merupakan corongnya Pemerintah untuk menyampaikan informasi mengenai pembangunan, baik pembangunan fisik maupun SDM kepada masyarakat, serta membantu pemerintah untuk menciptakan suasana yang kondusif antara pihak pemerintah dan masyarakat.

Humas merupakan suatu kegiatan untuk menanamkan dan memperoleh kepercayaan, pengertian, dan penghargaan dari publik kepada badan atau lembaga. Dan didalam humas itu sendiri terdapat suatu usaha untuk mewujudkan hubungan yang harmonis antara suatu lembaga dengan publiknya, usaha untuk menanamkan atau memberikan penjelasan atau keterangan kepada publik dengan jujur, sehingga publik merasa *well informed* dan diikuti sertakan dalam usaha yang direncanakan.

Bapak Abu Bakar, S. Sos, M.Ap menjelaskan humas pemerintah kabupaten Pelalawan dalam menyukseskan program pemerintah.

bertanggungjawab dalam menginformasikan kegiatan dan kebijakan pemerintah yang akan dipublikasikan kepada masyarakat. Maka dari itu program humas tidak lepas dari:

1. Menyebarluaskan informasi kepada masyarakat tentang kegiatan dan kebijakan pemerintah yang menyangkut kepentingan masyarakat banyak.
2. Mengajak masyarakat untuk turut serta memberikan masukan-masukan dan penilaian terhadap kegiatan pemerintah.
3. Meyakinkan masyarakat tentang maksud dan tujuan serta kegunaan pembangunan bagi masyarakat.
4. Mendokumentasikan kegiatan pokok Pemerintah kabupaten Pelalawan.

Dasar pemikiran humas dalam lembaga pemerintah berdasarkan pada dua hal pokok *pertama*, masyarakat punya hak untuk mengetahui karena itu pemerintah mempunyai tanggungjawab guna memberi penjelasan kepada masyarakat. *Kedua*, ada kebutuhan bagi pemerintah untuk menerima masukan dari masyarakat tentang persoalan baru dan tekanan sosial guna memperoleh partisipasi dan dukungan masyarakat (Moore, 2002:131)

Program-program yang senantiasa dijalankan oleh humas dalam rangka menyebarluaskan informasi mengenai kebijakan pemerintah, menjadi tanggungjawab humas untuk di publikasikan kepada masyarakat. Sasaran

yang dicapai agar masyarakat mengetahui segala bentuk kegiatan dan program pemerintah yang dicanangkan oleh pemerintah kabupaten Pelalawan dan terbentuknya opini publik yang mengarah pada tingkat kepercayaan yang tinggi terhadap pemerintah, yang pada akhirnya masyarakat mau ikut serta dalam pembangunan.

Rosady Ruslan (2003) dalam bukunya Manajemen Public Relation dan Media komunikasi menyatakan bahwa hubungan humas dengan *Pers* merupakan alat pendukung atau media kerjsama untuk kepentingan publikasi berbagai kegiatan untuk kelancaran aktivitas komunikasi humas dengan pihak publik. Disamping itu, dalam kerjasama dengan *pers* akan menghasilkan frekuensi publisitas yang cukup tinggi. Dampak pemberitaan tersebut bersifat efek keserempakan, efek dramatisir, efek publisitas tinggi dan memiliki pengaruh yang luar biasa terhadap pembentukan opini publik dalam waktu yang relatif singkat, sehubungan dengan jumlah pembaca atau *audiens* yang tersebar diberbagai tempat atau kawasan dalam waktu bersamaan.

Untuk mendukung kinerja Humas dalam menyebarkan informasi mengenai program pemerintah kabupaten Pelalawan, humas menggalang kerjasama dengan mengadakan pembinaan terhadap media massa, baik media cetak maupun elektronik. Hal ini dapat dilihat dari ruangan humas yang hampir setiap hari dipadati oleh wartawan dari berbagai media. Dengan tujuan untuk mendapat informasi mengenai kebijakan Pemerintah kabupaten Pelalawan.

Untuk itu humas pemerintah kabupaten Pelalawan senantiasa menginformasikan program pemerintah kepada masyarakat melalui media massa, sebagaimana keterangan Bapak Abu bakar S. Sos, M.Ap bahwa peningkatan program kerja humas terus dilakukan, dengan cara mengumpulkan informasi melalui media cetak maupun elektronik, termasuk Pelalawan sendiri ada Pelalawan terkini yang setiap harinya masuk untuk mempublikasikan perkembangan Pelalawan. Untuk koran ada terbitan tingkat Nasional dan terbitan Jakarta. Terbitan Jakarta setiap harinya menerbitkan perkembangan pembangunan Pelalawan.

Perlu diperhatikan bahwa humas pemerintah berbeda dengan humas non pemerintah, pada Humas pemerintah tidak mempunyai sesuatu yang diperjual belikan. Kendati demikian humas pemerintah juga senantiasa menggunakan teknik publisitas yang dilakukan untuk menyadarkan masyarakat akan hal-hal yang berhubungan dengan kegiatan pemerintah.

Humas dalam melakukan sosialisasi sudah sesuai dengan teori Laswell yang menjelaskan bahwa cara terbaik untuk menerangkan proses komunikasi adalah menjawab pertanyaan: *Who says What in Whice Chanel To Whom With What Effect* (Effendy, 2002:10). Paradigma ini merupakan unsur-unsur proses komunikasi, yaitu adanya komunikator, dimana sebagai sumber informasinya adalah petugas humas yang memberikan sosialisasi kepada masyarakat. Humas mempunyai tugas sebagai sumber informasi bagi

komunikannya, karena salah satu tugas humas adalah memberikan penerangan kepada masyarakat tentang kebijakan-kebijakan pemerintah.

Berdasarkan hasil wawancara dengan Bapak Abu Bakar humas pemerintah kabupaten Pelalawan senantiasa melakukan Upaya dalam mensosialisasikan program pemerintah yaitu dengan cara sosialisasi melalui media massa baik media cetak maupun elektronik. Humas sudah melakukan upaya dalam menginformasikan program pemerintah yakni program pembangunan Pelalawan, saat ini sudah ada Rubrik Pelalawan yang setiap harinya mengekspos pembangunan Pelalawan.

Adapun Program bagian humas pemerintah kabupaten Pelalawan yang telah ditetapkan adalah sebagai berikut:

1. Program peningkatan akses informasi

Program ini bertujuan meningkatkan ketersediaan dan kemudahan dalam akses informasi tentang pemerintah dan pembangunan kabupaten Pelalawan. kegiatan program ini adalah:

- a. Menyusun teks sambutan Bupati
- b. Pemberitaan di penerbitan pers dan media elektronik
- c. Pembuatan kliping tentang informasi pemerintahan, pembangunan, dan kemasyarakatan dari media cetak yang menyangkut pemerintah kabupaten Pelalawan.

- d. Pembuatan foto dan VCD tentang kegiatan pemerintah dan pembangunan di kabupaten Pelalawan.
- e. Penyusunan analisa informasi kehumasan dan kebijakan pemerintah kabupaten Pelalawan.

2. Program Peningkatan jangkauan Penyebarluasan Informasi Publik

Program ini bertujuan meningkatkan pemerataan dan mutu informasi komunikasi kepada masyarakat khususnya yang berada diwilayah kabupaten Pelalawan. kegiatan program ini adalah:

- a. Penyebaran informasi melalui surat kabar
- b. Penyebaran informasi melalui media luar ruang
- c. Penyusunan *Press Realease*
- d. Melaksanakan kemitraan dengan pers dalam peliputan dan pemberitaan.

3. Program Peningkatan Kualitas Sumberdaya Aparatur

Program ini bertujuan meningkatkan kemampuan dan ketrampilan petugas/pegawai. Kegiatan program ini adalah:

- a. Mengikutsertakan diklat yang diselenggarakan oleh pemerintah pusat, pemerintah daerah, atau oleh pihak lainnya.
- b. Melakukan pembinaan pelaksanaan tugas secara berkelanjutan.

Kinerja operasional berkaitan dengan efektifitas penggunaan sumberdaya yang digunakan oleh instansi. kinerja merupakan prestasi kerja atau kemampuan kerja dari dari suatu tim/individu dari suatu bagian bagi

pencapaian tujuan organisasi. Sedangkan penilaian kinerja dimaksudkan untuk menilai prestasi kerja tersebut, apakah sesuai dengan perencanaan yang telah ditetapkan (Prawirosentono, 1999: 2).

Berdasarkan penjelasan diatas humas pemerintah kabupaten Pelalawan telah menjalankan kinerjanya dengan baik, sebagaimana keterangan yang disampaikan Bapak Indra Gunawan S.Ag, bahwa Adanya kerjasama yang baik dengan media, baik media cetak maupun elektronik akan mempermudah kinerja humas dalam menyukseskan program pemerintah. Hal ini dibuktikan dengan prestetasi yang telah di dapat oleh Humas yaitu humas mendapatkan Pin Emas sebuah penghargaan dari Persatuan Wartawan Indonesi (PWI) karena telah menjalin hubungan baik dengan media.

Disamping itu di tahun 2010 jumlah media yang digunakan berjumlah 67 media cetak dan 7 media elektronik, di banding tahun 2009 media tahun ini bertambah. Tahun lalu media yang digunakan untuk promosi hanya berjumlah 40 media cetak dan 4 media elektronik, walaupun untuk dana menurun, namun untuk kerja di bidang promosi meningkat, buktinya tahun 2009 koran hanya 40 sekarang sudah 67 sedangkan untuk media elektronik tahun lalau 4 sekarang sudah 7 media elektronik. Hal ini menunjukkan bahwa untuk kinerja Humas dibidang promosi mengalami peningkatan.

B. Faktor Penghambat Dan Pendukung Kinerja Humas Pemerintah Kabupaten Pelalawan Dalam Menyukseskan Program Pemerintah

Menurut Mahmudi (2005: 21) kinerja merupakan suatu konstruk multimedimensional yang mencakup banyak faktor yang mempengaruhinya.

Faktor-faktor yang mempengaruhi kinerja adalah:

1. Faktor personal/individual meliputi pendidikan, pengetahuan, ketrampilan (*skil*), kemampuan, kepercayaan diri, motivasi dan komitmen yang dimiliki oleh individu.
2. Faktor kepemimpinan, meliputi kualitas dalam memberikan dorongan, semangat, arahan dan dukungan yang yang diberikan pemimpin/*team leader*.
3. Faktor tim, meliputi kualitas dukungan dan semangat yang diberikan oleh rekan dalam satu tim,kepercayaan terhadap sesama anggota tim, kekompakan dan keeratan anggota tim.
4. Faktor sistem, meliputi sistem kerja fasilitas kerja, insfrastruktur yang diberikan organisasi .
5. Faktor kontekstual, meliputi tekanan dan perubahan lingkungan eksternal dan internal.

Kinerja humas pemerintah kabupaten Pelalawan dalam melaksanakan tugasnya tidak lepas dari faktor-faktor tertentu, di mana ada faktor

penghambat dan pendukung dalam melaksanakan aktivitas humas. Berikut ini faktor pendukung dan penghambat kinerja Humas:

1. Faktor Pendukung

Berdasarkan hasil wawancara, ada beberapa faktor yang dapat dijadikan pendukung kinerja humas dalam melaksanakan program pemerintah. Faktor pendukung keberhasilan kinerja humas dalam melaksanakan program pemerintah tidak terlepas dari dukung media cetak dan media elektronik yang turut serta mempublikasikan kebijakan program pemerintah. Hal ini juga terdapat pada kinerja humas pemerintah kabupaten Pelalawan dimana faktor pendukung kinerja humas yaitu adanya hubungan yang baik dengan media baik media cetak maupun elektronik. Adanya kerjasama yang baik dengan media akan mempermudah kinerja humas dalam melaksanakan program pemerintah.

Kemudian faktor pendukung lain yaitu tersedianya sarana dan prasarana yang mendukung kinerja humas diantaranya: 2 unit mobil operasional, 3 unit kamera video, 3 unit kamera digital, 3 unit laptop, 4 unit komputer dilengkapi dengan jaringan internet.

2. Faktor Penghambat

Salah satu yang menjadi faktor penghambat dalam melaksanakan kinerja humas pemerintah kabupaten Pelalawan adalah sumber daya manusia (SDM) yang belum memadai karena masih sedikitnya pegawai Humas yang

memiliki *skil* di bidang kehumasan baik pendidikan formal ataupun informal terbatas. Serta masih kurangnya jumlah personil pegawai humas.

Latar belakang pendidikan seseorang sangat mempengaruhi tingkat profesiona saat mereka bekerja. Orang yang kompeten adalah orang yang menguasai/ahli dibidangnya (pekerjaan). Jadi seorang praktisi humas sudah seharusnya mempunyai latar belakang atau *becground* pendidikan humas, karena latar belakang pendidikan tersebut sangat mempengaruhi tingkat profesional pekerjaan seorang humas dan menjadikan humas orang yang berkompeten dibidangnya. Perlu latar belakang pendidikan humas bagi praktisi humas menjadikan tugas, fungsi, dan peran serta kinerja humas lebih maksimal.

Kurangnya dana untuk kegiatan humas merupakan salah satu faktor penghambat kinerja humas. Berdasarkan hasil wawancara dengan Humas pemerintah kabupaten Pelalawan dijelaskan bahwa Secara global semua kegiatan perlu dana, untuk tahun ini dana APBD turun 40% dibandingkan tahun 2009. Kurangnya dana ini menghambat kinerja humas, karena seharusnya humas memiliki dana yang besar untuk melakukan tugasnya.

BAB V

KESIMPULAN

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan pada bab sebelumnya, maka dalam bab ini penulis menarik kesimpulan dan memberikan saran-saran yang dapat diharapkan memberikan manfaat bagi humas dalam menjalankan kinerjanya.

A. Kesimpulan

1. Humas pemerintah kabupaten Pelalawan sudah melakukan kinerjanya dengan baik dengan cara memberikan informasi program pemerintah yakni program peningkatan akses informasi, program peningkatan jangkauan penyebarluasan informasi publik, dan program peningkatan sumberdaya aparatur. Program disosialisasikan melalui media massa, melalui media luar ruang seperti brosur, slogan, spanduk, melakukan sosialisasi, membuka website yang bertujuan untuk menyukseskan program pemerintah. Media promosi pada tahun 2010 mengalami peningkatan dibanding tahun 2009 yakni tahun lalu media cetak hanya 40 media cetak sedangkan di tahun 2010 menjadi 67 media cetak. Untuk media elektronik tahun 2009 hanya 4 media elektronik, tahun 2010 menjadi 7 media elektronik. Hal ini membuktikan bahwa kinerja humas dalam bidang promosi mengalami peningkatan.

Adapun media publikasi yang digunakan Humas Pemerintah kabupaten Pemerintah Pelalawan adalah menggunakan media cetak dan media elektronik. Media cetak yang digunakan diantaranya Riau Pos, Riau Mandiri, Metro Riau, Media Indonesia, Media Riau, Tribune Pekanbaru, Pekanbaru Pos, Rakyat Riau, Riau Pesisir, Koran Riau, Vokal, Batak Pos, Pelalawan Tribune, Intermezo, Azam, Genta, Horas Plus, Utusan Melayu, Senior, Bidik, Fokus, Moral, Media Demokrat, Melayu Pos, Kibar Pelalawan, Binar. Sedangkan media elektronik diantaranya RTV, TVRI, TV One, Metro Indonesia, RRI, Riau Terkini, Riau Gemuruh.

2. Faktor pendukung kinerja humas dalam menyukseskan program pemerintah adalah adanya kerjasama yang baik dengan media baik media cetak maupun elektronik, adanya fasilitas sarana dan prasarana yang memadai untuk mendukung kinerja humas. Kinerja humas dalam menyukseskan program pemerintah terdapat beberapa hambatan, hambatan-hambatan tersebut seperti Sumber Daya Manusia karena masih sedikitnya pegawai humas yang memiliki *skil* di bidang kehumasan baik pendidikan formal ataupun informal. Kurangnya jumlah personil humas dan kurangnya dana untuk kegiatan humas merupakan faktor penghambat dalam melaksanakan kinerja humas.

B. Saran

1. Humas pemerintah kabupaten Pelalawan harus lebih sering dan aktif dalam mensosialisasikan program pemerintah kepada masyarakat, agar masyarakat mengetahui adanya program tersebut. Hal ini dikarenakan masyarakat ada yang tidak mengetahui adanya program pemerintah kabupaten Pelalawan.
2. Diharapkan humas pemerintah kabupaten Pelalawan lebih meningkatkan mutu atau kualitas kerjanya dalam menyelesaikan program Pemerintah.
3. Pelatihan mengenai kehumasan harus sering dilaksanakan agar SDM yang terdapat di sub bagian humas pemerintah kabupaten Pelalawan lebih mengerti tentang kehumasan. Dengan pelatihan juga diharapkan agar permasalahan mengenai minimnya SDM yang berlatar belakang pendidikan kehumasan dapat diatasi.

DAFTAR KEPUSTAKAAN

- Bonar SK, 1993, *Hubungan Masyarakat Modern*, Jakarta: PT Rineka Cipta
- Bungin, Burhan, 2004, *Metode Penelitian Kualitatif*, Jakarta: Bumi Aksara
- Departemen Pendidikan Nasional, 2005, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, Jakarta, Balai Pustaka.
- Effendi, Onong Uchana, 2004, *Ilmu Komunikasi Teori dan Praktek*. Bandung: Rosdakarya
- Mahmudi, 2005, *Manajemen Kinerja Sektor Publik*, Penerbit Unit Penerbit dan Percetakan Akademi Manajemen Perusahaan YKPN, Yogyakarta.
- Mangu, Anwar Prabu, 2006, *Management Sumber Daya Manusia*, Bandung: Rieka Cipta
- Moleong, Lexi J. 2004. *Metode Penelitian Kualitatif*, Bandung: Rosdakarya
- Moore, Fraizer, 2002, *Humas, Prinsip, Kasus dan Masalah*, Bandung: Remaja Rosdakarya.
- Prawirosentono Suyadi, 1999, *Manajemen SDM Kebijakan Kinerja Karyawan Kiat membangun Organisasi kompetitif Menjelang Perdagangan Bebas Dunia*, Yogyakarta, BPFE
- Ruki Achmad S, 2004, *Sistem Manajemen Kinerja*, Jakarta: PT Gramedia Pustaka Utama
- Ruslan Rosady. 1999. *Manajemen Public Relations & Media Komunikasi: Konsep dan Aplikasi*, Jakarta: Raja Grafindo Persada.
- _____, 2003, *Metode Penelitian Public Relations dan Komunikasi*: Jakarta Grafindo Persada

_____, 2008, *Manajemen Public Relations & Media Komunikasi: Konsep dan Aplikasi* (edisi revisi), Jakarta: Raja Grafindo Persada

Wibowo, 2007, *Manajemen Kinerja*, Jakarta: Raja Grafindo Perkasa

Widjaja, 1993, *Komunikasi dan Humas*, Jakarta: Bumi Aksara

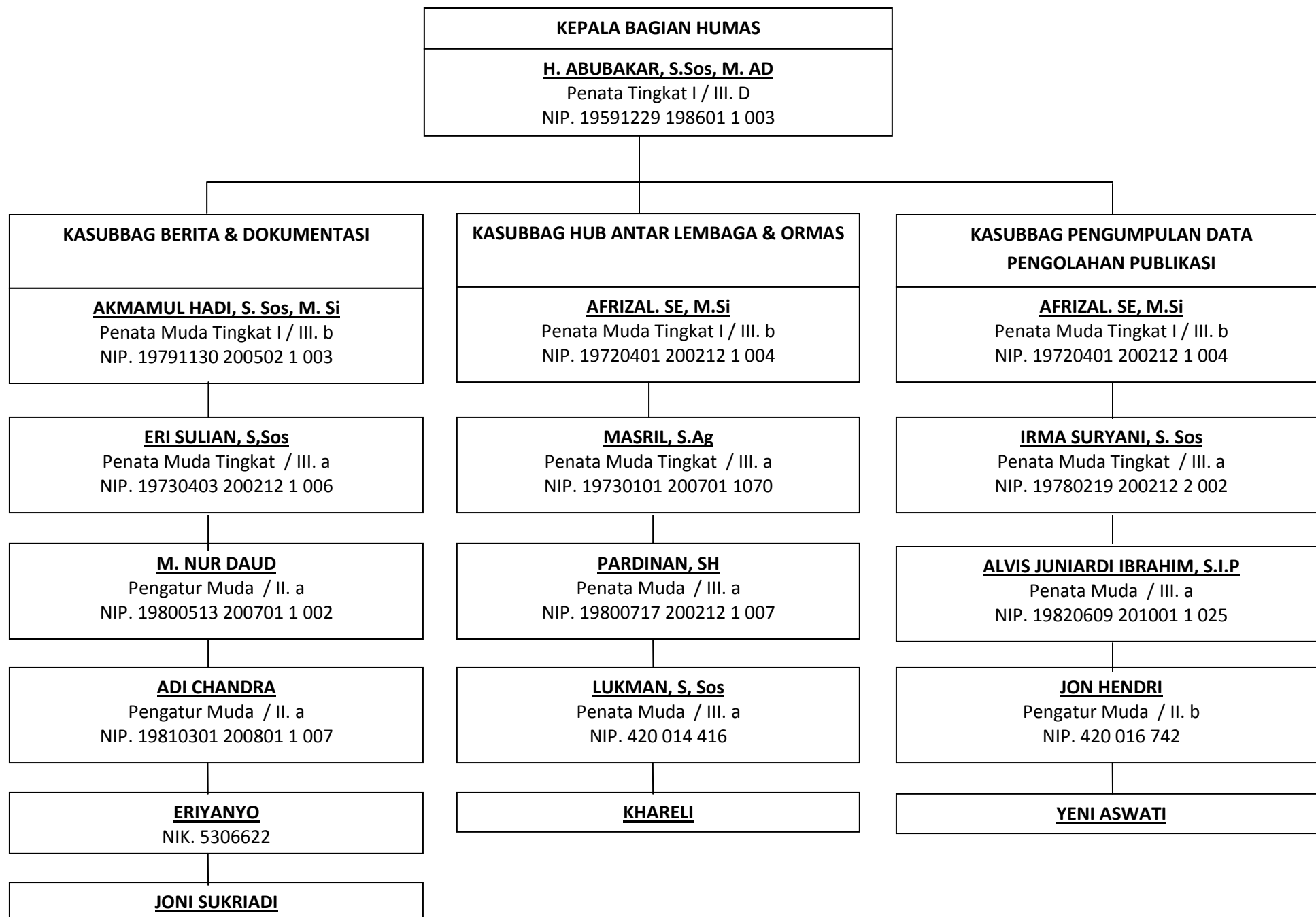
Sumber lain:

UU Otonomo Daerah Tahun 1999

PDE Sekretariat Daerah Kabupaten Pelalawan, 2009, *Prioritas Pembangunan*

<http://www.pelalawankab.go.id>. diakses, tanggal 3 Januari 2010, jam 19.30 WIB

**STRUKTUR ORGANISASI
BAGIAN HUMAS SETDA KAB. PELALAWAN**



DRAF WAWANCARA

1. Apakah Anda memiliki latar belakang pendidikan Humas?
2. Apa saja uraian tugas yang menjadi tanggungjawab Humas?
3. Apa upaya yang dilakukan Humas Pemerintah Kabupaten Pelalawan dalam menyukseskan program pemerintah?
4. Apa aktivitas Humas Pemerintah kabupaten Pelalawan dalam menyukseskan Program pemerintah
5. Apa saja program Humas pemerintah Kabupaten Pelalawan dalam menyukseskan program pemerintah?
6. Bagaimana Humas dalam mensosialisasikan program-program pembangunan kepada masyarakat?
7. Media apa saja yang digunakan humas pemerintah kabupaten Pelalawan dalam mensosialisasikan Program pemerintah?
8. Bagaimana Hubungan yang terjalin dengan media?
9. Apa prestasi yang telah di raih Humas Pemerintah Kabupaten Pelalawan dalam mensukseskan Program Pemerintah?
10. Faktor-faktor apa saja yang menjadi pendukung dan penghambat kinerja Humas Pemerintah kabupaten Pelalawan?
11. Apa upaya Humas Pemerintah kabupaten Pelalawan dalam mengatasi Faktor penghambat tersebut?